

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

ANALISIS POLA HUBUNGAN TINGKAT INFLASI DAN TINGKAT  
PENGANGGURAN DI INDONESIA TAHUN 1983 – 2005

## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Asal:	Hasil Pembelian	Klass
Terima Tgl :	20 JUL 2006	332.41
No. Induk :		Wis
Oleh :		a
KLAFIR / PENYALIN:		

ERFAN PUTRO WISAKSONO  
NIM. 000810101343

ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER

2006

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan Putro Wisaksono  
N I M : 000810101343  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Judul Skripsi : Analisis Pola Hubungan Antara Tingkat Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1983 – 2005

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, saya bersedia mempertanggung jawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 28 Juni 2006

Yang menyatakan

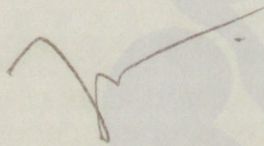


(Erfan Putro Wisaksono)

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pola Hubungan Tingkat Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1983 – 2005  
Nama : Erfan Putro Wisaksono  
N I M : 000810101343  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Moneter

Pembimbing I



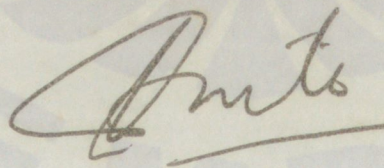
Dr. H M Saleh, M.Sc  
NIP : 131 417 212

Pembimbing II



Drs Urip Muharso M.Si  
NIP : 131 120 333

Mengetahui,  
Ketua Jurusan IESP



Drs. J Sugiarto, SU  
NIP : 130 610 494

Tanggal Persetujuan : Juni 2006

**LEMBAR PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS POLA HUBUNGAN TINGKAT INFLASI DAN TINGKAT  
PENGANGGURAN DI INDONESIA TAHUN 1983 – 2005**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Erfan Putro Wisaksono  
NIM : 000810101343  
Jurusan : Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal :

**30 Juni 2006**

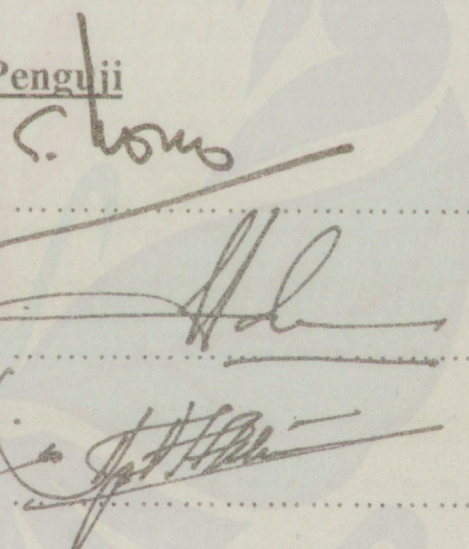
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

**Susunan Tim Penguji**

Ketua : Drs. Soeyono, MM  
NIP. 131 386 653

Sekretaris : Drs. M. Adenan, MM  
NIP 131 996 155

Anggota : Drs. Urip Muharso, MP  
NIP 131 120 333



Mengetahui;  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,



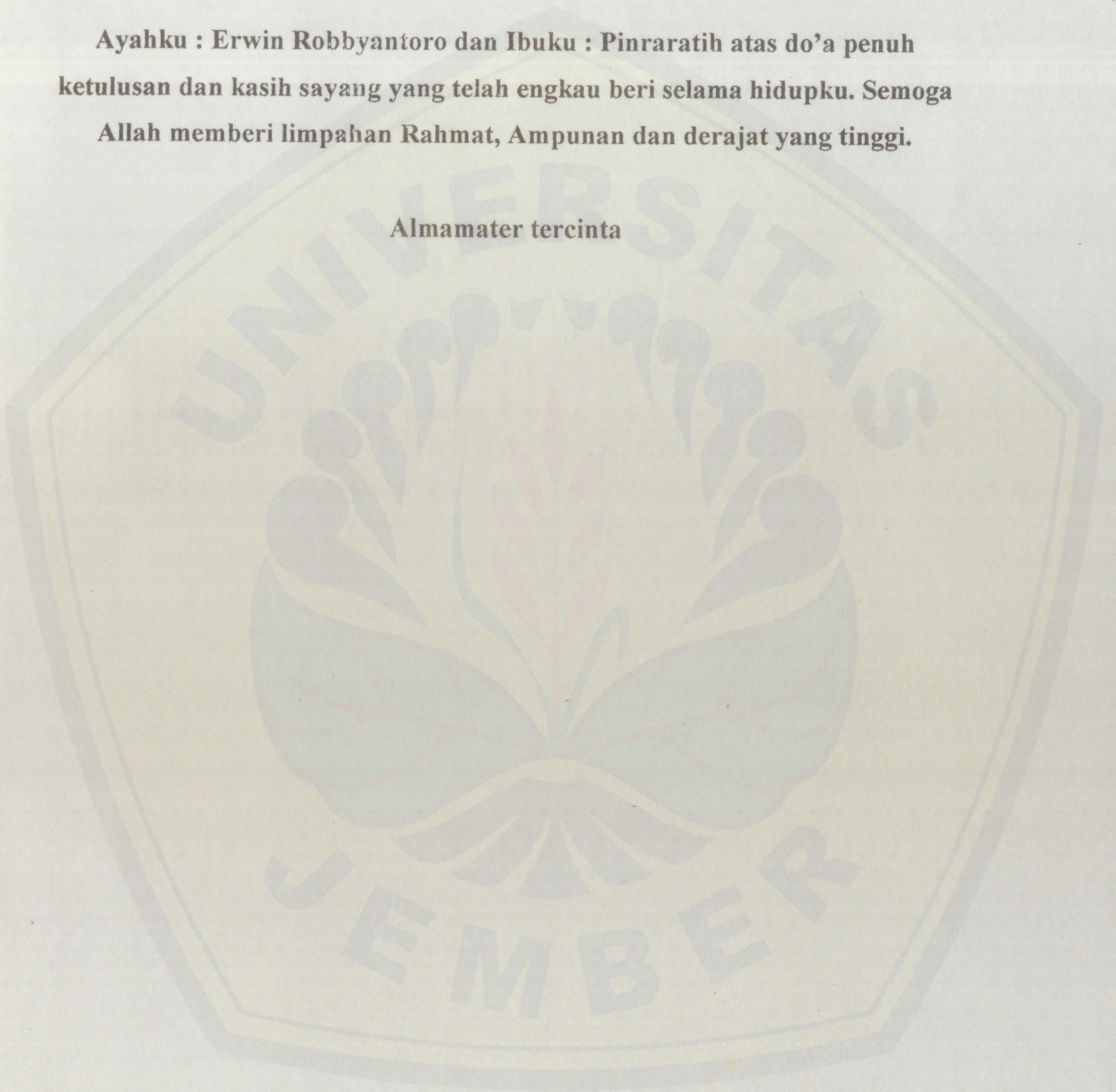
Dr. H. Sarwedi, MM  
NIP 131 278 658

**PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

**Ayahku : Erwin Robbyantoro dan Ibuku : Pinraratih atas do'a penuh ketulusan dan kasih sayang yang telah engkau beri selama hidupku. Semoga Allah memberi limpahan Rahmat, Ampunan dan derajat yang tinggi.**

**Almamater tercinta**



## MOTTO

“ Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam “  
( QS. Al. An'am : 162)

“ Dan, Sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu “  
( QS. Muhammad : 31 )

“ Jika waktu shalat telah tiba, ambillah wudhu lalu berjalanlah ke tempat shalat kemudian duduklah sejenak, hingga pikiran dan jiwamu tenang, setelah itu berdirilah untuk memulai shalat. Pada saat itu bayangkan seolah-olah Baitullah Ka'bah berada di depanmu, Kakimu seakan berada di atas jembatan shirat, sementara neraka seakan-akan disamping kirimu, surga disamping kananmu, dan bayangkan saat itu malaikat pencabut nyawa telah hadir tepat berada di belakangmu. Kemudian rasakan dengan kuat bahwa inilah shalat terakhirmu “  
(Hatim Asham r.a )

“Letak kebahagiaan memang sangatlah tinggi namun bagi ku tidak seorang pun yang tidak dapat merasakan kebahagiaan itu. Yang ada hanyalah mereka yang tidak mau bersabar dalam doa dan akal yang terus berjuang penuh pengorbanan hingga tetes air mata dan keringat mendekati puncak kebahagiaan itu...”  
( my self)

Yakin Usaha Sampai  
( Hymne )

## ABSTRACT

The aim of this research is to know description of correlation between inflation and unemployment. Used data is time series from year 1983 – 2005.

Method of analysis used predictability concept or Granger with bidirectional causality relation. It Resulted that there was indication correlation the variable.

By using estimation Granger model this research is found correlate from both variable. Analysis could be explained used 4 lag with degree significancy 95 % obtained by conclusion unemployment influenced inflation with Fprobability is 0,031360 with koefisient of determinant ( $R^2$ ) is 0,741625. On the other side inflation influence unemployment with Fprobability is 0,00082 and koefisient of determinant ( $R^2$ ) is 0,959915.

Pursuant to result obtained by conclusion, both variable have bidirectional causality and have an effect negative correlation.

Keyword : Inflation and Unemployment

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan yang terjadi antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Data yang digunakan adalah data runtut waktu (time series) dari tahun ke tahun yaitu dimulai tahun 1983 sampai dengan tahun 2005.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pengujian kausalitas Granger. Pada penelitian tersebut menunjukkan pola hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi atas dasar Indeks Harga Konsumen (IHK) yang masing-masing pada lag 4 dan dengan derajat keyakinan 95 % sehingga diperoleh suatu analisis mengenai nilai dari koefisien regresi dimana tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat inflasi yang ditunjukkan dengan nilai  $F_{\text{probabilitas}}$  sebesar  $0,031360 < \alpha$  sedangkan nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0,741625, sedangkan tingkat inflasi mempengaruhi tingkat pengangguran ditunjukkan dengan nilai  $F_{\text{probabilitas}}$  sebesar  $0,000082 < \alpha$  sedangkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,959915.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa adanya pola hubungan timbal balik dan terjadi pola hubungan yang negatif diantara ke dua variabel.

Kata Kunci : Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karuniaNya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir studi ini dengan judul “ Analisis Pola Hubungan Tingkat inflasi Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1983 – 2005 “

Penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik karena juga ada pihak-pihak yang selalu memberikan bimbingan, bantuan, nasehat ataupun motivasi secara khusus sehingga menjadi layak bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

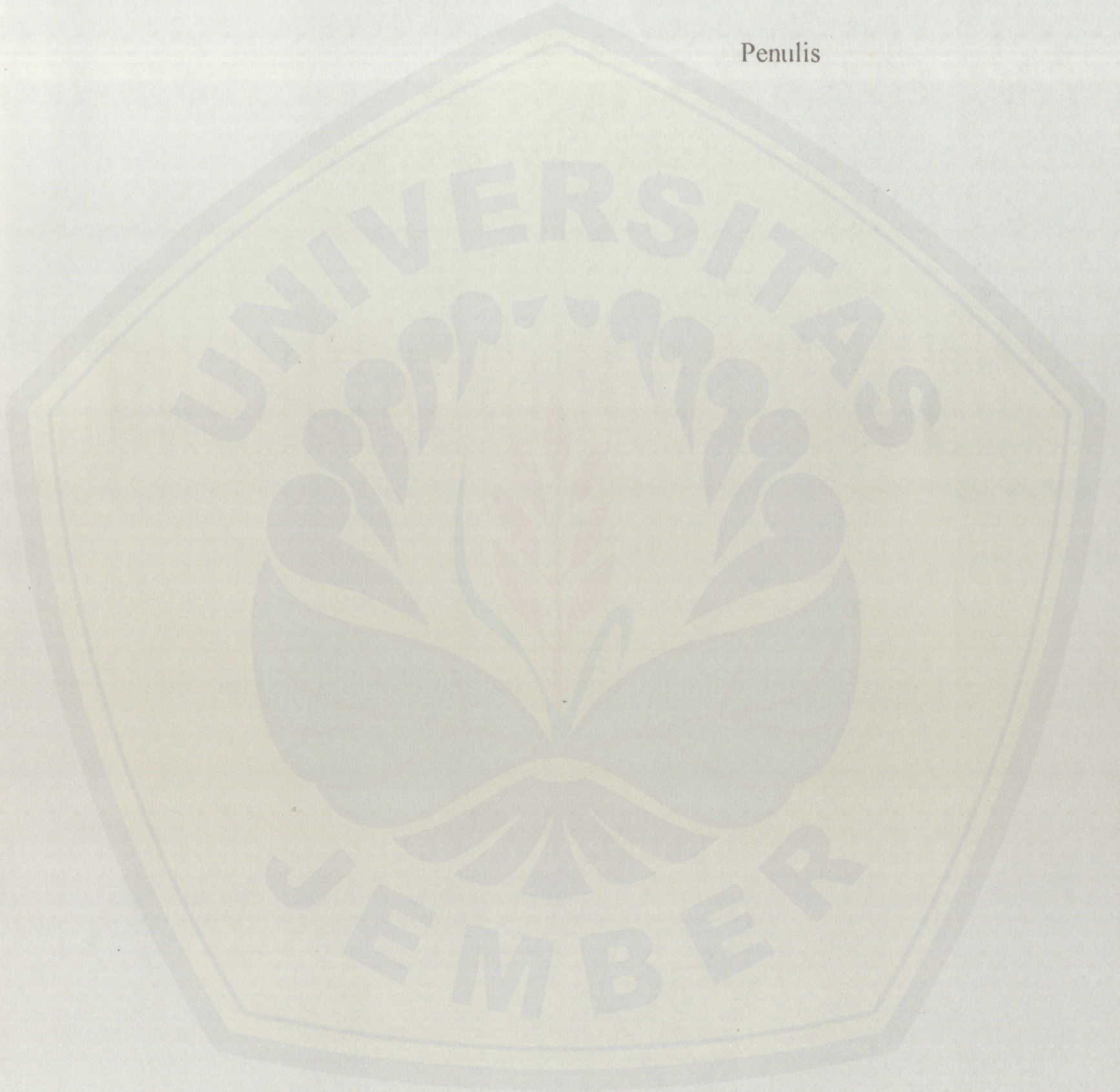
1. Bapak Dr. H. Sarwedi, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta seluruh staf jajaran di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember atas segala bantuan dan pengarahannya selama penulis mengerjakan skripsi.
2. Bapak Dr. H. M. Saleh, M.Sc dan bapak Drs. Urip Muharso MP, selaku dosen pembimbing atas waktu, kesempatan dan bimbingannya dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi tersebut.
3. Bapak Drs. J Sugiarto, SU, selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atas segala nasehat – nasehat yang diberikan selama ini.
4. Bapak Piter di Badan Pusat Statistik atas bantuan datanya.
5. Sahabat-sahabatku Akbar, Moh Lut, Khodim, Agung, Dinda, Iwan atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.
6. Saudara-saudara himpunan di komisariat, cabang dan badko terima kasih atas bantuan dan ilmu yang bermanfaat.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Patut disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga sangat membutuhkan saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan di masa-masa

masa yang akan datang. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca dan khasanah keilmuan

Jember, Juni 2006

Penulis



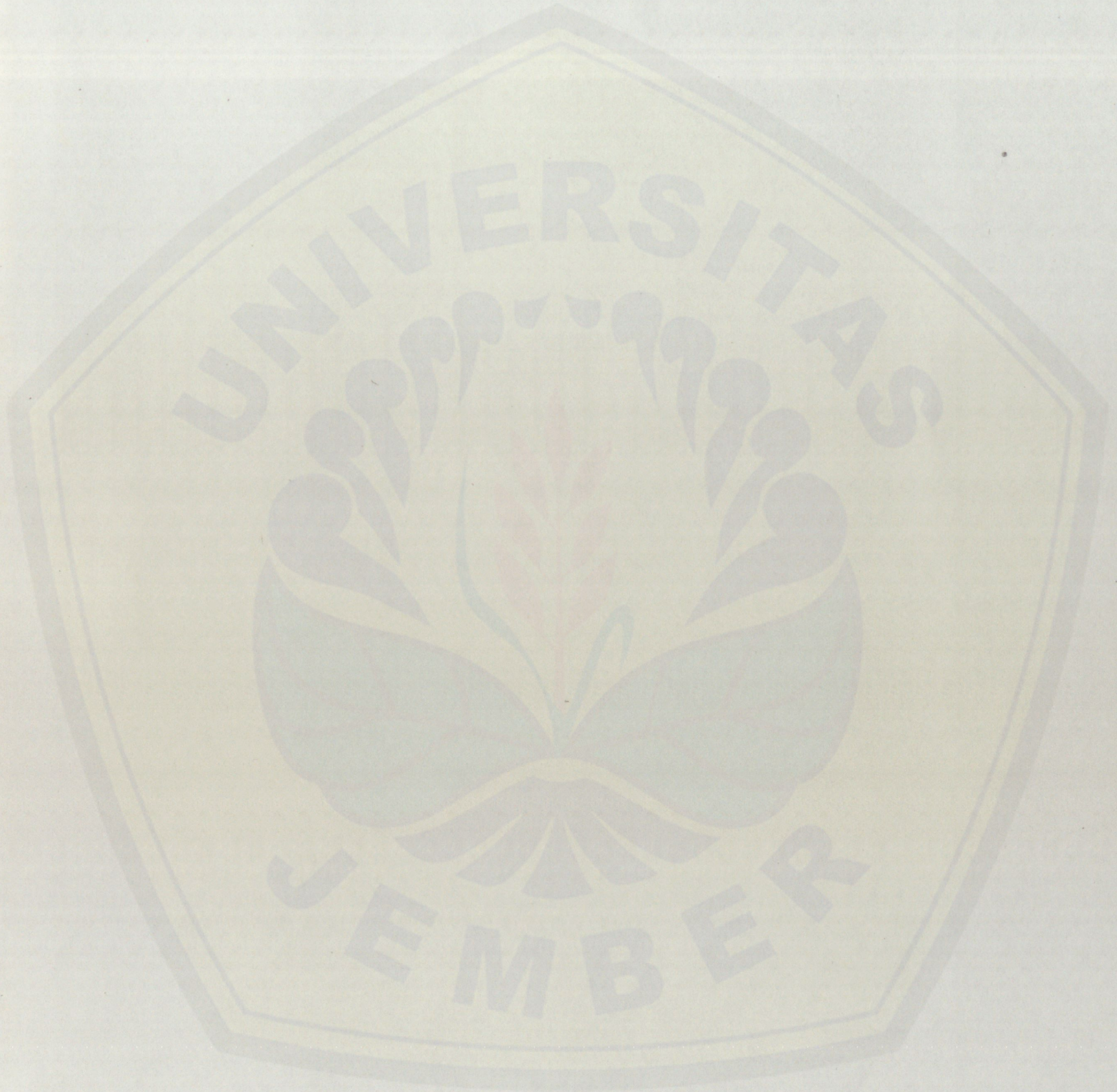
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAKSI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
 <b>Bab 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Batasan Masalah .....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	6
 <b>Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Teori Pengangguran .....	7
2.1.2 Jenis Dan Sebab Akibat Pengangguran.....	8
2.1.3 Teori Inflasi .....	17
2.1.4 Jenis Inflasi Menurut Sifatnya .....	20

2.1.5 Efek Inflasi .....	21
2.1.6 Cara Mencegah Inflasi .....	23
2.1.7 Keterkaitan Inflasi dan Pengangguran .....	25
2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya .....	29
2.3 Hipotesis .....	30
<b>Bab 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Rancangan Penelitian .....	31
3.1.1 Jenis Penelitian.....	31
3.1.2 Unit Analisis .....	31
3.2 Populasi dan Sampel .....	31
3.3 Tehnik Pengumpulan Data .....	31
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran .....	31
3.5 Metode Analisis Data .....	32
3.5.1 Uji Kausalitas Granger .....	32
3.5.2 Pengujian Koefisien Regresi Linier .....	34
<b>Bab 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	36
4.1.1 Perkembangan Inflasi IHK di Indonesia Pada Tahun 1983 - 2005.....	36
4.1.2 Perkembangan Pengangguran di Indonesia Pada Tahun 1983 – 2005 .....	44
4.2 Hasil Analisis Data.....	46
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	47
<b>Bab 5 SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan.....	50
5.2 Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

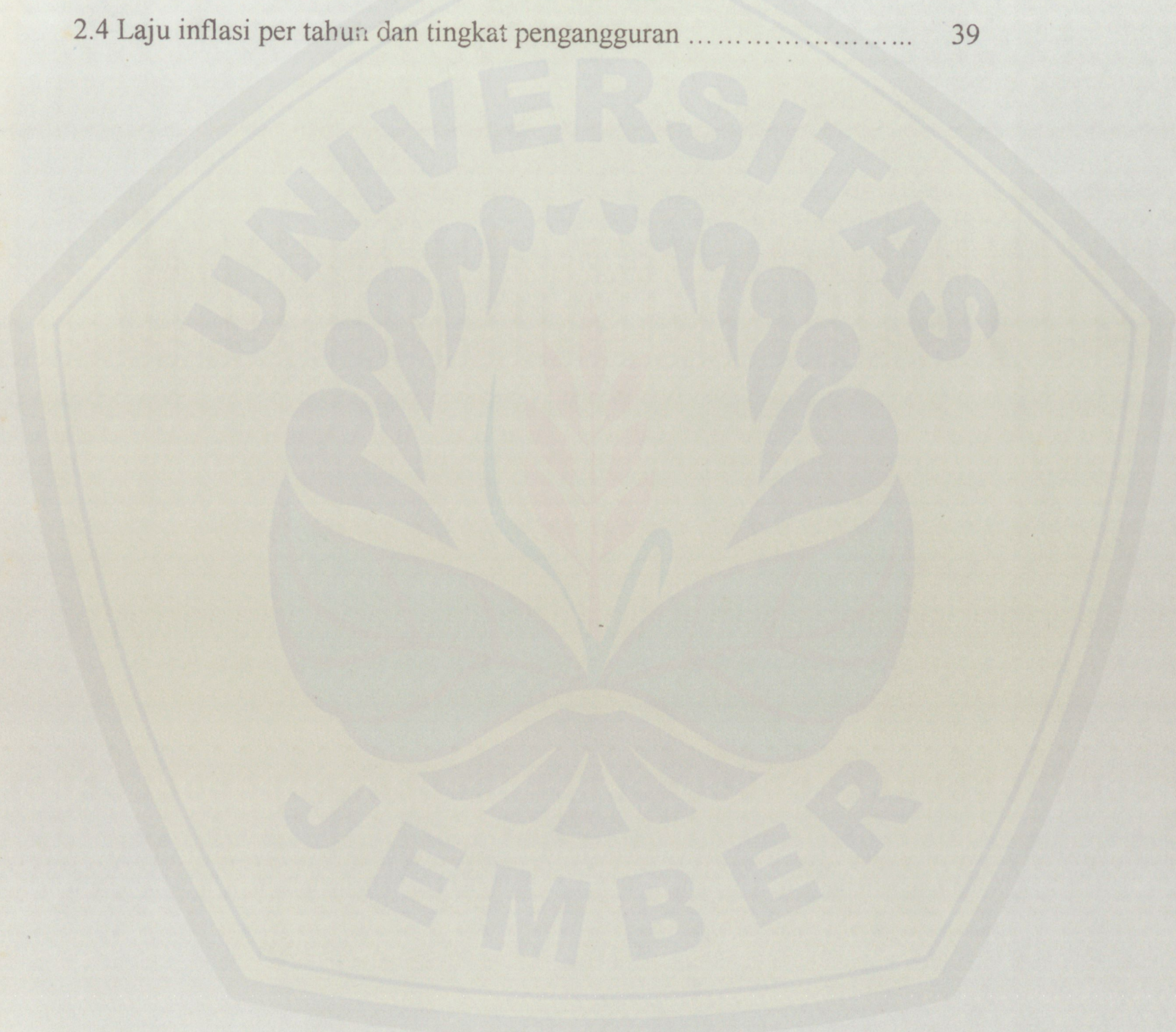
DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
4.1	Sumbangan Komponen Inflasi IHK .....	42



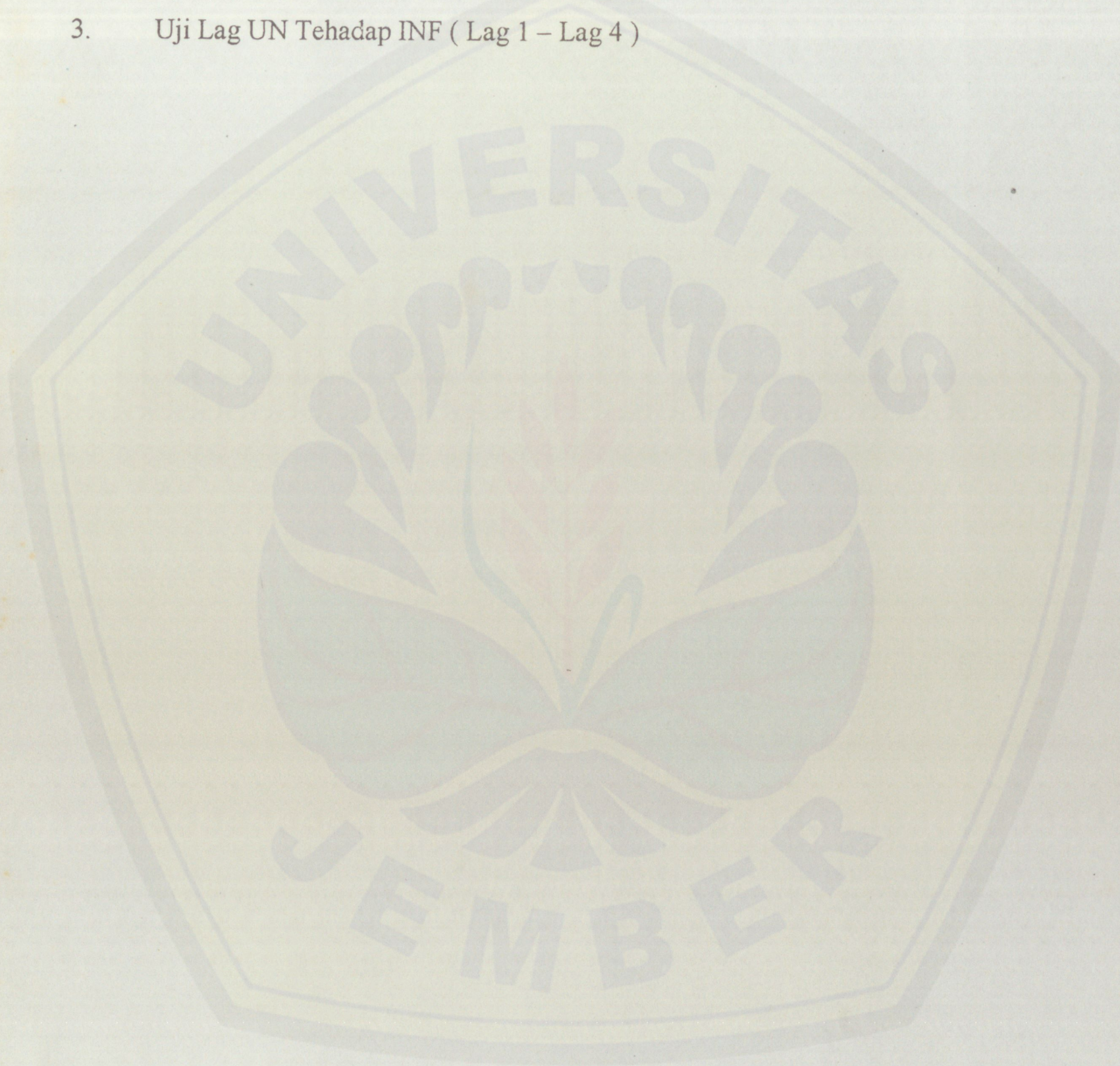
## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
2.1	Pengangguran sukarela dan tak sukarela .....	13
2.2	Hubungan tingkat upah dan tingkat pengangguran .....	26
2.3	Hubungan tingkat harga dan tingkat pengangguran .....	28
2.4	Laju inflasi per tahun dan tingkat pengangguran .....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

- | No | Judul   |
|----|---|
| 1. | Data Base (Inflasi dan Jumlah Pengangguran Indonesia Tahun 1983-2005) |
| 2. | Uji Lag INF Terhadap UN ( Lag 1 – Lag 4 )                             |
| 3. | Uji Lag UN Terhadap INF ( Lag 1 – Lag 4 )                             |



## Bab 1. PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam periode krisis ekonomi yang telah berjalan selama tujuh tahun terakhir, kita dapat menyaksikan lonjakan harga secara tajam, terutama pada tahun 1998. Pada tahun tersebut tingkat inflasi mencapai 57 persen atau kira-kira delapan kali tingkat inflasi rata-rata sebelum krisis. Puncak inflasi terjadi pada bulan September 1998, yaitu sekitar 82 persen. Pada tahun sebelumnya keadaan ini berbalik menjadi deflasi. Selama dua tahun terakhir tingkat inflasi kembali normal seperti sebelum krisis (Imam Sugema dan Solikin, 2004: 237)

Inflasi secara harfiah didefinisikan sebagai pergerakan kenaikan harga secara umum. Dengan kata lain inflasi mencerminkan kenaikan harga barang-barang konsumsi secara menyeluruh, walaupun tingkat kenaikan harga di masing-masing komoditi secara relatif berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, pemahaman tentang dinamika pembentukan harga di level mikro atau di tingkat komoditi dan sektor akan sangat membantu dalam memahami pola pergerakan secara umum.

Setiap negara maju maupun negara berkembang sering kali menghadapi permasalahan yang sangat rumit terutama dalam memelihara kestabilan dan laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat kestabilan ekonomi yang dimaksud meliputi kestabilan tingkat harga, perkembangan tingkat pendapatan, tingkat pertumbuhan kesempatan kerja serta dalam kaitannya dengan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Pemeliharaan kestabilan ekonomi ini lebih bersifat jangka pendek, sedangkan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kesempatan kerja merupakan masalah jangka panjang yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pembangunan. Dalam upaya memelihara tingkat kestabilan ekonomi tersebut, maka peranan pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan adalah sangat penting, terutama dalam menentukan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal (Wijaya, 1992 :3).

Di tengah kemajuan ekonomi yang dicapai selama ini, berbagai permasalahan dan tantangan masih dihadapi perekonomian Indonesia. Pada tahun



1989/1990, perekonomian nasional menunjukkan aktivitas yang meningkat dengan laju pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Namun meningkatnya kegiatan ekonomi tersebut juga diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga menyebabkan permasalahan kependudukan dan ketenagakerjaan.

Angkatan kerja di Indonesia sejak awal 1980-an bertambah lebih cepat dari tingkat pertumbuhannya dalam dasawarsa sebelumnya. Sebab utama dari peningkatan angkatan kerja tersebut adalah semakin meningkatnya partisipasi kerja kaum wanita dalam angkatan kerja. Tingginya tingkat penambahan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan tersedianya lapangan kerja merupakan problematika perekonomian Indonesia yang belum dapat dipecahkan. Seiring dengan tingginya tingkat penambahan angkatan kerja tersebut, perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada masalah inflasi yang mengarah pada *double digit* (Sundrum, 1980 : 17)

Masalah inflasi dan ketenagakerjaan dalam perekonomian Indonesia, diupayakan penyelesaiannya dengan berbagai kebijakan, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Pada prinsipnya kebijakan moneter mempunyai peran penting di dalam pembangunan suatu negara. Tentunya hal ini terkait dengan kebijakan makro yang lain yaitu kebijakan fiskal dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter lebih diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan termasuk pendapatan dan kesempatan kerja serta kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Diharapkan dengan kebijakan moneter tersebut, dapat menekan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan neraca pembayaran secara serempak.

Inflasi bersama-sama tingkat pengangguran dan ketidakseimbangan neraca pembayaran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia. Pada masa sebelum pemerintahan Orde Baru (antara 1960-1965), Indonesia mengalami *hyper inflation* dimana laju inflasi mencapai 650 persen. Untuk mengatasi keadaan ini pemerintah melancarkan program rehabilitasi dan stabilitasi yang sasaran utamanya mengendalikan inflasi melalui penetapan suku bunga tinggi. Kebijakan suku bunga tersebut digantikan dengan penetapan pagu

kredit pada tahun 1974 (Iswardono, 1991: 127). Deregulasi 1 Juni 1983 mengakibatkan perubahan mekanisme piranti pengendalian moneter yang sebelumnya ditempuh melalui penetapan pagu kredit menjadi pengaturan jumlah uang primer. Dilihat dari sudut monetarist, pengendalian inflasi identik dengan pengurangan jumlah uang beredar yang ada ditangan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Paket kebijakan 20 Januari 1990. Inti kebijakan tersebut disamping menyehatkan struktur moneter juga mempunyai sasaran pengendalian laju inflasi. Secara rinci kebijakan itu berupa, keputusan untuk meniadakan kredit likuiditas pada bank-bank umum, dengan cara ini maka akan memperkecil kucuran kredit dari bank ke tangan masyarakat sehingga jumlah uang beredar dapat dikendalikan, demikian pula inflasi (Uphadi, 1997:3).

Pada tahun 1991, perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal tersebut antara lain tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu mencapai 8,9% dengan laju inflasi yang dapat dikendalikan pada tingkat 9,93%. Memasuki tahun 1997, terjadi krisis nilai tukar rupiah yang diikuti pula dengan krisis perbankan telah menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian. Pada semester I tahun 1997, perekonomian Indonesia sempat memperlihatkan perkembangan yang baik, namun secara keseluruhan perekonomian Indonesia selama tahun 1997 mencatat pertumbuhan ekonomi yang jauh melambat disertai dengan meningkatnya laju inflasi dan tingkat pengangguran. Pada tahun 1997 laju inflasi di Indonesia mencapai 10,31 persen dan merupakan laju inflasi tertinggi sejak tahun 1984 yang hanya 9,06 persen, sementara itu tingkat pengangguran pada tahun 1997 mencapai 4.275.200 jiwa dan hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1980 yang hanya 868.123 jiwa. Fenomena ini menunjukkan bahwa laju inflasi yang cukup tinggi ternyata diikuti dengan penambahan tingkat pengangguran yang cukup tinggi pula. (Ninasapti, 2005:715)

Tingkat inflasi dan pengangguran juga terkait dengan tingkat, pengeluaran masyarakat. Pengeluaran masyarakat khususnya *public spending*, masih dapat dinaikkan tanpa menimbulkan bahaya inflasi, selama masih banyak pengangguran di dalam suatu perekonomian. Apabila pengangguran sudah mulai berkurang

maka penambahan pengeluaran masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga secara umum. Dalam kenyataannya muncul suatu dilema, yaitu dengan menekan inflasi telah memberikan peluang pengangguran semakin bertambah dan usaha untuk mengurangi pengangguran telah menambah terjadinya inflasi. (Mangkusuwondo, 1974:54).

Sebagai salah satu indikator kunci yang diperhitungkan dalam pencapaian target kebijakan moneter dengan sasaran tunggal stabilitas harga, perilaku dinamis inflasi ( *inflation dynamic* ) merupakan fenomena yang strategis, sekaligus kompleks – baik dilihat dari aspek struktural maupun moneter – untuk dipelajari. Hal ini mengingat perilaku dinamis inflasi mengakomodir pola perkembangan variable-variabel ekonomi di sisi permintaan dan penawaran, respon kebijakan moneter, maupun kelembagaan. Dengan demikian, untuk memahami perilaku variabel-variabel ekonomi makro utama, khususnya harga ( inflasi ), pelaksanaan, pengendalian, dan *assessment* terhadap kinerja kebijakan moneter ( transmisi kebijakan moneter ) dapat dilakukan dengan efektif.

Perdebatan mengenai permasalahan inflasi di beberapa negara kebanyakan diwarnai oleh perhatian lebih pada arah perkembangan dari variabel utama yang terkait, yaitu tingkat pengangguran. Keterkaitan ini sering bermula pada banyak industri – industri atau perusahaan – perusahaan yang ingin melakukan efisiensi dengan merumahkan atau memberhentikan karyawannya. Di banyak negara sedang berkembang dan negara – negara miskin dampak inflasi terhadap lapangan kerja lebih tragis lagi dan angka pengangguran sulit untuk dikendalikan. Lebih – lebih kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama jika dibandingkan dengan Tenaga Kerja Asing ( TKA).

Sementara itu, pada periode pasca krisis moneter menunjukkan data bahwa tingkat pengangguran pada tahun 1998 mencapai jumlah 5.060.000 jiwa dan tingginya tingkat inflasi pada tahun tersebut yang menembus level 77,63 %. (Anwar Nasution, 2005: 425). Fenomena ini menunjukkan bahwa laju inflasi yang tinggi akan diikuti oleh pertambahan tingkat pengangguran yang tinggi pula. Tingkat inflasi dan pengangguran juga terkait dengan tingkat pengeluaran masyarakat. Pengeluaran masyarakat masih dapat dinaikkan tanpa menimbulkan

bahaya inflasi, selama masih banyak pengangguran di dalam perekonomian. Apabila pengangguran sudah mulai berkurang maka pengeluaran masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya harga – harga secara umum. Dalam kenyataannya muncul suatu dilema atau terjadi trade off (perlu adanya kompromi) yaitu dengan menekan inflasi akan memberikan peluang pengangguran semakin bertambah dan usaha untuk mengurangi pengangguran telah menambah terjadinya inflasi

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang terjadi yaitu dengan menekan inflasi telah memberikan peluang pengangguran semakin bertambah dan usaha untuk mengurangi pengangguran telah menambah terjadinya inflasi dan berdasarkan teori kurva Phillips yang mengatakan bahwa adanya keterkaitan di antara tingkat inflasi tingkat pengangguran, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah apakah dalam penelitian tersebut akan terjadi hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dan bagaimana pola hubungan yang terjadi diantara kedua variabel tersebut ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian tersebut dua variabel terkait yang akan diteliti adalah inflasi berdasarkan indeks harga konsumen (IHK) dan pengangguran secara terbuka. Sementara untuk variabel lain sebagai bahan atau referensi yang mendukung dan bukan termasuk variabel yang akan diteliti dalam penulisan skripsi tersebut.

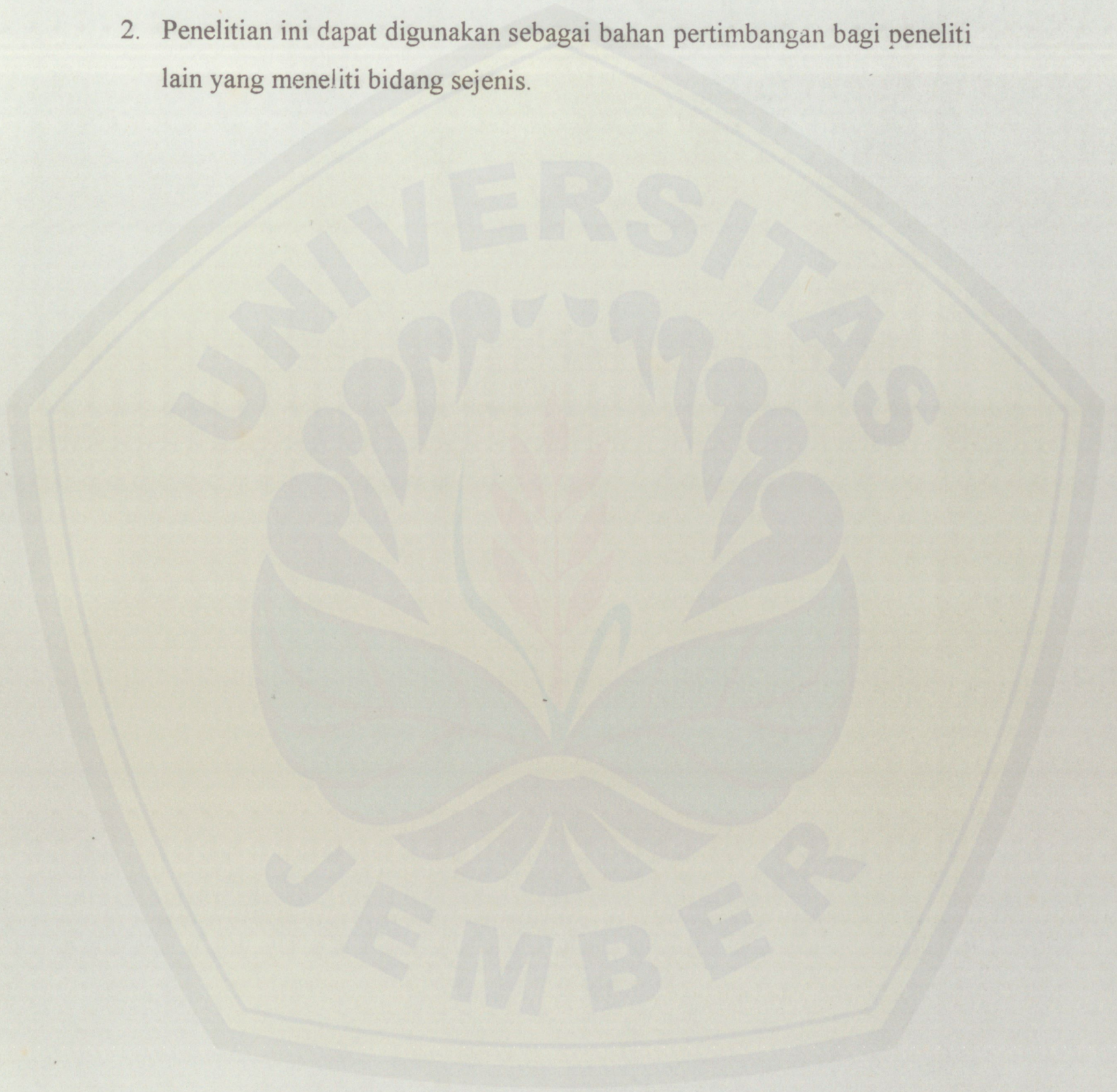
## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

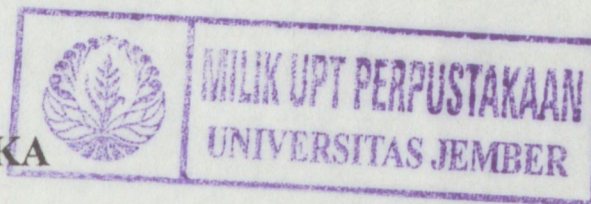
Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola hubungan kausalitas yang terjadi antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran.

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang inflasi dan pengangguran.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang meneliti bidang sejenis.



## Bab 2. TINJAUAN PUSTAKA



### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Pengangguran

Menurut apa yang dikatakan oleh N Gregory Mankiw pengangguran terjadi karena adanya empat hal yaitu :

1. Peraturan upah minimum. Dengan menaikkan upah bagi pekerja tidak berkeahlian dan tidak berpengalaman diatas tingkat equilibrium, peraturan upah minimum menaikkan kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan dan mengurangi kuantitas tenaga kerja yang diminta. Kelebihan penawaran ini merupakan pengangguran.
2. Kekuatan pasar dari serikat pekerja. Saat serikat pekerja memaksa upah berada diatas tingkat equilibrium dalam industri – industri tertentu berarti mereka telah menciptakan kelebihan penawaran angkatan kerja.
3. Teori upah efisiensi, menurut teori ini pemberi kerja akan diuntungkan untuk membayar upah diatas tingkat equilibrium. Upah yang tinggi bisa memperbaiki kesehatan pekerja, menurunkan perputaran pekerja, menaikkan kerja keras pekerja, dan menaikkan kualitas pekerja.
4. Waktu yang dibutuhkan pencari kerja untuk mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan preferensi dan keahlian mereka. Asumsi pengangguran adalah sebuah program pemerintah yang meskipun melindungi pendapatan pekerja, menaikkan jumlah pengangguran yang ditimbulkan oleh proses pencarian kerja.

Berdasarkan kepada faktor-faktor yang menimbulkannya, pengangguran dapat dibedakan kepada tiga jenis: pengangguran konjungtur, pengangguran struktural dan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Ketiga-tiga jenis pengangguran ini dapat dikelompokkan sebagai pengangguran terbuka, yaitu dalam periode dimana tenaga kerja menganggur mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan apapun. Disamping itu di negara-negara berkembang seperti negara kita

didapati beberapa bentuk pengangguran lain, yaitu : pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim dan setengah menganggur.

### 2.1.2 Jenis dan Sebab Akibat Pengangguran

#### A) Jenis-jenis Pengangguran

##### 1. Pengangguran Konjungtur.

Pengangguran konjungtur atau dalam bahasa inggrisnya dinamakan *cyclical unemployment* adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksinya. Dalam pelaksanaannya hal itu berarti jam kerja dikurangi, sebagian mesin memproduksi tidak digunakan dan sebagian tenaga kerja diberhentikan.

Dengan demikian kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran. Tenaga kerja terus bertambah sebagai akibat dari kemasukan tenaga kerja baru yang diakibatkan oleh penambahan penduduk. Apabila kemunduran ekonomi terus berlangsung, atau kegiatan perekonomian mulai berkembang tetapi perkembangan tersebut sangat lambat dan tidak dapat menyerap penambahan tenaga kerja, pengangguran konjungtur akan menjadi bertambah serius.

Ini berarti untuk mengatasi masalah pengangguran yang diakibatkan oleh kemunduran kegiatan ekonomi, tetapi harus pula berusaha untuk menyediakan kesempatan kerja untuk tenaga kerja yang baru memasuki pasaran tenaga kerja. Pengangguran konjungtur hanya dapat dikurangi atau diatasi masalahnya apabila pertumbuhan ekonomi yang berlaku.

##### 2. Pengangguran Struktural

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi selalu diikuti oleh perubahan struktural dan corak kegiatan ekonomi. Perkembangan perekonomian dalam jangka waktu, misalnya, akan meningkatkan peranan sektor industri pengolahan dan mengurangi kegiatan pertambangan dan

pertanian. Juga industri-industri rumah tangga dan industri kecil-kecil akan mengalami kemunduran dan digantikan oleh kegiatan industri yang menghasilkan barang yang sama tetapi menggunakan peralatan yang lebih canggih.

Perubahan struktur dan kegiatan ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi dapat menimbulkan masalah pengangguran yang dinamakan pengangguran struktural. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan pengangguran struktural: (i) sebagai akibat dari kemerosotan permintaan, atau (ii) sebagai akibat dari semakin canggihnya teknik memproduksi. Faktor yang kedua memungkinkan sesuatu perusahaan menaikkan produksi dan pada waktu yang sama mengurangi pekerja. Pengangguran yang diakibatkan oleh kemajuan teknik memproduksi dinamakan pengangguran teknologi. Salah satu contoh dari pengangguran struktural yang diakibatkan oleh kemerosotan permintaan adalah pengangguran yang berlaku di kalangan tukang jahit dan tukang sepatu tradisional sebagai akibat perkembangan industri garmen dan sepatu modern. Para konsumen lebih suka membeli baju dan sepatu yang siap pakai, dan tidak lagi memesan ke tukang jahit dan tukang sepatu. Mereka menghadapi masalah kekurangan permintaan dan lebih banyak menganggur daripada bekerja. Contoh pengangguran yang diakibatkan penggunaan mesin yang lebih canggih, atau pengangguran teknologi, antara lain dapat dilihat di sektor pembangunan jalan raya. Mesin-mesin berat ini akan mengurangi tenaga manusia yang diperlukan dalam kegiatan membangun jalan-jalan raya.

Untuk menghindari pengangguran seperti ini, di Indonesia penggunaan mesin-mesin berat untuk membangun jalan raya agak dibatasi. Akan tetapi di Malaysia, yang menghadapi masalah kekurangan buruh yang serius, lebih banyak mesin-mesin berat digunakan untuk menggantikan manusia.



### 3. Pengangguran Normal.

Apabila dalam suatu periode tertentu perekonomian terus menerus mengalami perkembangan yang pesat, jumlah dan tingkat pengangguran akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, yaitu apabila pengangguran tidak melebihi dari 4 persen. Pengangguran yang berlaku dinamakan pengangguran normal. Segolongan ahli ekonomi menggunakan istilah pengangguran friksional (*frictional unemployment*) atau pengangguran mencari (*search unemployment*) sebagai ganti istilah pengangguran normal.

Pengangguran normal bukanlah wujud sebagai akibat dari ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan. Ia berlaku sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. Apalagi perekonomian mencapai kemakmuran dan tingkat pengangguran adalah sangat rendah, para pengusaha akan menghadapi kesulitan untuk memperoleh pekerjaan baru untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan memproduksi. Keadaan seperti ini akan menimbulkan beberapa perubahan dalam pasaran tenaga buruh. Salah satu keadaan yang akan menuntut kenaikan gaji.

Disamping itu akan didapati pula keadaan dimana segolongan tenaga kerja – buruh kasar maupun tenaga ahli dan tenaga profesional – akan meninggalkan kerjanya yang lama dan mencari pekerjaan yang baru yang lebih tinggi. Di dalam proses mencari kerja yang lebih baik tersebut adakalanya mereka harus menganggur. Akan tetapi pengangguran ini tidak serius karena ia bersifat sementara.

### 4. Pengangguran Tersembunyi

Apabila dalam sesuatu kegiatan perekonomian jumlah tenaga kerja sangat berlebihan pengangguran tersembunyi atau pengangguran tak ketara dapat berlaku. Sebagai akibat dari kelebihan tenaga kerja tersebut, sebahagian tenaga kerja di kegiatan tersebut dapat dipindahkan ke kegiatan ekonomi yang lain tanpa mengurangi tingkat produksi di kegiatan yang pertama. Kelebihan tenaga kerja dan pengangguran tersembunyi di sektor

pertanian banyak berlaku di negara-negara berkembang. Jumlah penduduk yang sudah sangat cepat, menyebabkan rasio (perbandingan) di antara tanah-tenaga kerja di negara-negara tersebut sangat kecil sekali.

Kesulitan untuk mencari kerja di sektor lain menyebabkan tenaga kerja yang bertambah dari tahun ke tahun tetap tinggal di sektor pertanian yang sudah sangat padat penduduknya. Tenaga kerja yang bertambah tersebut tidak dapat menimbulkan pertambahan yang berarti kepada tingkat produksi di sektor pertanian. Dengan demikian sebahagian dari tenaga kerja yang berada di sektor pertanian adalah tidak produktif dan dapat dipindahkan ke sektor lain tanpa mengurangi produksi di sektor pertanian.

#### 5. Pengangguran Musiman

Bentuk pengangguran lain yang sering kali wujud di sektor pertanian di negara-negara berkembang adalah pengangguran musiman. Yang dimaksud dengan pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada waktu-waktu dimana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Waktu di antara menuai dan masa menanam berikutnya, dan periode di antara menanam bibit dan masa mengutip hasilnya, adalah masa yang kurang sibuk dalam kegiatan pertanian. Di dalam periode tersebut banyak di antara para petani dan tenaga kerja di sektor pertanian tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Berarti mereka sedang keadaan menganggur. Tetapi pengangguran itu adalah untuk sementara saja, dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu ia dinamakan pengangguran musiman.

#### 6. Setengah Menganggur

Kelebihan penduduk di sektor pertanian di negara-negara berkembang, yang disertai oleh pertambahan penduduknya yang cepat dari tahun ke tahun, telah menimbulkan percepatan dalam proses urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota). Salah satu tujuan utama dari migrasi tersebut

adalah untuk mencari pekerjaan di kota-kota. Tetapi migrasi itu jauh lebih cepat dari kemampuan kota-kota negara berkembang untuk menyediakan pekerjaan-pekerjaan baru. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang berhijrah ke kota-kota dapat memperoleh pekerjaan. Banyak di antara mereka yang harus menganggur dalam waktu yang lama.

Disamping itu ada pula yang mendapat pekerjaan, tetapi jam kerjanya setiap hari/minggu adalah jauh lebih rendah dari jumlah jam kerja yang seharusnya dilakukan seseorang dalam masa tersebut (7 jam sehari atau 40 jam seminggu). Tenaga kerja yang bekerja dalam jumlah jam kerja yang terbatas itu tidak dapat dianggap sebagai sepenuhnya bekerja. Tetapi mereka juga bukanlah penganggur. Oleh sebab itu mereka digolongkan sebagai setengah pengangguran atau *under employment*. Masalah pengangguran ini banyak dijumpai di sektor informal.

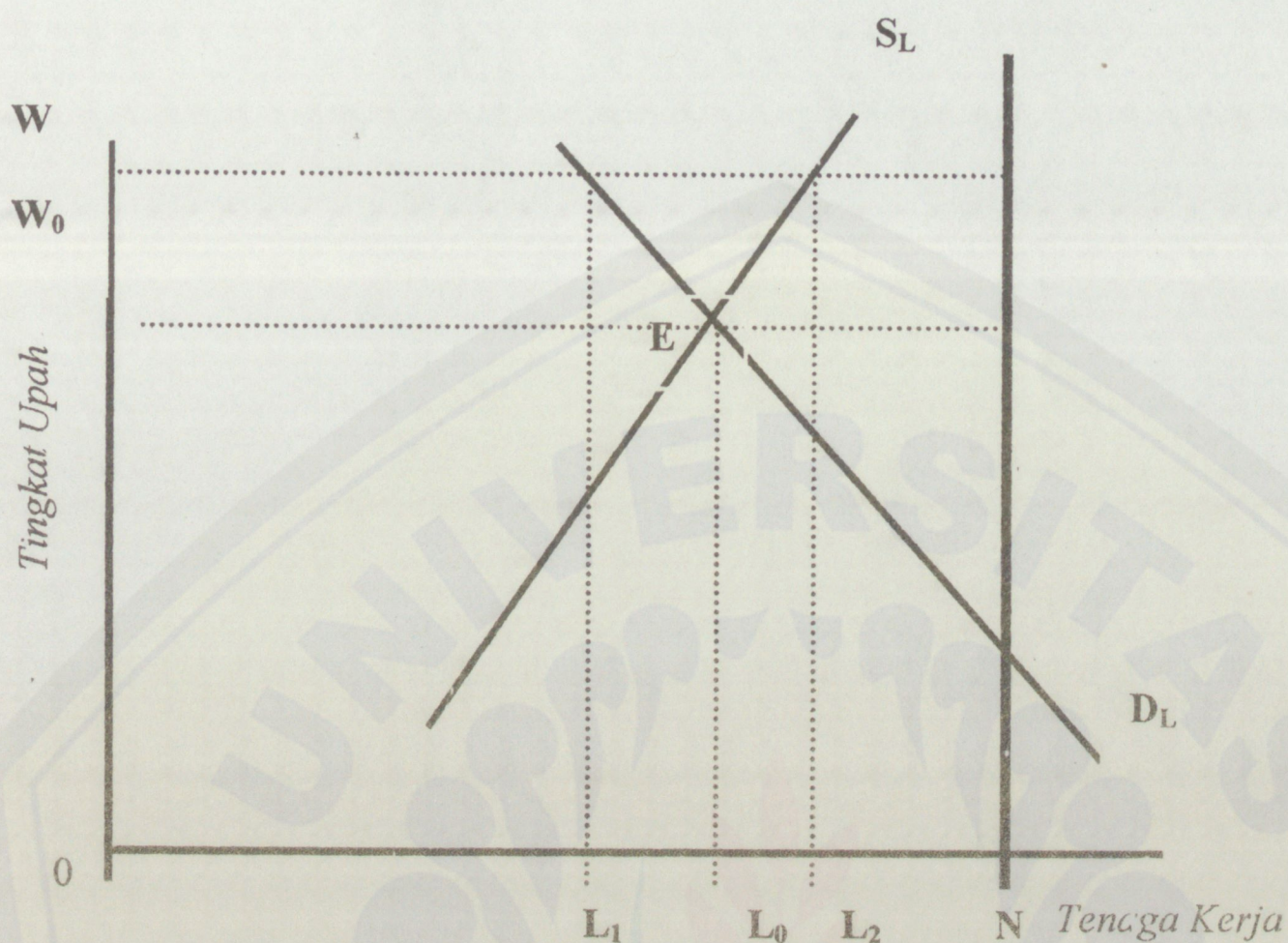
#### 7. Pengangguran Sukarela dan Tak Sukarela

Telah diterangkan bahwa tidak semua penduduk yang berada di dalam lingkungan umur bekerja tergolong sebagai angkatan kerja. Mahasiswa dan pelajar dan ibu-ibu rumah tangga tidak digolongkan dalam angkatan kerja walaupun berdasarkan umum, mereka dapat digolongkan sebagai angkatan kerja. Golongan penduduk ini dinamakan pengangguran sukarela.

Dalam teori ekonomi pengangguran sukarela dapat didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang tidak mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu. Apabila pada suatu tingkat upah tertentu tenaga kerja secara aktif mencari kerja, tetapi mereka tidak dapat memperoleh kerja, tenaga kerja ini digolongkan sebagai pengangguran tak sukarela (*involuntary unemployment*) atau pengangguran terpaksa.

Perbedaan di antara pengangguran sukarela dan tak sukarela dapat dengan jelas dipahami apabila kedua-duanya ditunjukkan dalam suatu grafik yang akan menggambarkan kondisi para penganggur yang sukarela maupun yang tak sukarela dengan tingkat upah tertentu.

Gambar 2.1 : Pengangguran sukarela dan tak sukarela



Sumber : Sadono Sukirno, 1994:301

Dalam gambar 2.1 kurva  $D_L$  menggambarkan permintaan ke atas tenaga kerja, sedangkan  $S_L$  menggambarkan penawaran tenaga kerja. Kurva  $D_L$  yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah menggambarkan bahwa apabila tingkat upah tinggi, permintaan tenaga kerja sedikit dan semakin rendah tingkat upah, semakin banyak permintaan tenaga kerja. Kurva  $S_L$  yang menaik dari kiri bawah ke kanan atas menggambarkan bahwa semakin tinggi upah, semakin banyak tenaga kerja yang ditawarkan. Garis tegak N menggambarkan batas jumlah penduduk yang tergolong kepada penduduk dalam usia kerja (*working age population*), yaitu penduduk berumur lebih dari 15 tahun tetapi kurang dari 65 tahun.

Apabila tingkat upah fleksibel, mekanisme pasar di pasaran tenaga kerja akan menyebabkan keseimbangan di antara permintaan dan penawaran, yaitu seperti yang digambarkan di antara permintaan dan penawaran, yaitu seperti yang digambarkan oleh titik E. dengan demikian mekanisme pasar di pasaran tenaga

kerja akan menyebabkan tingkat upah mencapai  $W_0$  dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan mencapai banyak  $L_0$ . Perbedaan di antara  $N$  dengan  $L_0$  dinamakan pengangguran sukarela. Dalam keseimbangan ini tidak terdapat pengangguran tak sukarela.

Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat pasaran tenaga kerja adalah pasaran persaingan sempurna. Dalam pasaran seperti ini tingkat upah ditentukan oleh keadaan permintaan dan penawaran tenaga kerja; upah akan ditentukan oleh keseimbangan di antara permintaan dan penawaran. Dengan demikian, berdasarkan kepada gambar 2.1 tingkat upah  $W_0$  dan sebanyak  $L_0$  tenaga kerja akan digunakan dalam perekonomian. Dalam perekonomian hanya terdapat pengangguran sukarela, pengangguran tak sukarela tidak wujud. Dengan perkataan lain, berdasarkan kepada keyakinan bahwa pasaran tenaga kerja adalah pasaran persaingan sempurna, ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu wujud dalam perekonomian.

Keynes berpendapat bahwa pasaran tenaga kerja bukanlah persaingan sempurna. Dalam perekonomian yang modern, serikat-serikat buruh sangat besar peranannya dalam menentukan tingkat upah. Misalkan interaksi di antara serikat buruh dan majikan menentukan tingkat upah dalam perekonomian pada  $W$ . Pada tingkat upah ini para majikan hanya menggunakan  $L_1$  tenaga kerja. Pada tingkat upah ini sebanyak  $L_2$  menawarkan diri untuk bekerja, tetapi mereka tidak mendapat lowongan kerja. Golongan tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan ini ( $L_1L_2$ ) dinamakan pengangguran tak sukarela. Pengangguran sukarela pada tingkat upah sebanyak  $W$  adalah  $L_2N$ .

#### B) Sebab dan Akibat-Akibat Pengangguran

Sementara itu, akibat-akibat pengangguran dari kebanyakan ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa pengangguran struktural dan pengangguran normal bukanlah merupakan masalah pengangguran yang perlu dirisaukan. Mereka menganggap pengangguran tersebut timbul sebagai akibat dari berlakunya pertumbuhan ekonomi. Pengangguran normal terutama wujud sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang teguh yang mampu meminimumkan tingkat pengangguran dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cepat

mengakibatkan pula perombakan dalam struktur kegiatan ekonomi dan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Dengan demikian pengangguran normal dan struktural merupakan pengangguran yang tidak dapat dielakkan.

Pengangguran yang lebih serius masalahnya dan yang menimbulkan berbagai akibat buruk kepada perekonomian dan masyarakat adalah pengangguran konjungtur. Pertumbuhan ekonomi yang lambat, yang diselang-selingi dengan kemunduran ekonomi (resesi) akan menambah jumlah dan presentasi pengangguran. Keadaan kekurangan kesempatan kerja dan kelesuan kegiatan produksi dan perdagangan akan lebih nyata kelihatan. Pengangguran konjungtur yang serius akan menimbulkan beberapa akibat buruk ke atas kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan analisis, akibat buruk dari pengangguran akan dibedakan kepada dua aspek yaitu akibat buruk terhadap perekonomian, dan akibat buruk terhadap individu dan masyarakat. Bisa dijelaskan sebagai berikut :

1) Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian.

Di setiap negara selalu akan berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperhatikan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan secara berikut :

- a. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya setelah ditunjukkan bahwa pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai adalah lebih rendah dari pendapatan nasional potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin dicapainya.
- b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah,

dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Dengan demikian pengangguran yang tinggi mengurangi kemampuan pemerintah menjalankan kegiatan pembangunan.

c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi

Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula sektor kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Keadaan ini tidak menggalakkan mereka melakukan investasi di masa datang. Kedua, pengangguran yang diakibatkan kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan untuk melakukan investasi. Kedua-dua hal diatas tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

2) Akibat buruk terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah :

a. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Di negara-negara maju para penganggur memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran, oleh sebab itu mereka masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya. Mereka tidak perlu bergantung kepada tabungan mereka atau bantuan orang lain. Di negara-negara berkembang tidak terdapat program asuransi pengangguran. Maka kehidupan penganggur harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman/bantuan keluarga dan kawan-kawan. Keadaan ini bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis.

b. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan ketrampilan

Ketrampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila ketrampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran dalam periode yang lama akan menyebabkan tingkat ketrampilan pekerja menjadi semakin merosot.

- c. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan semakin tidak populer di mata masyarakat. Berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah dan adakalanya ia disertai oleh demonstrasi dan huru hara. Kegiatan-kegiatan bersifat kriminal (pencurian dan perampokan) akan meningkat.

### 2.1.3 Teori Inflasi

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi. Tiga teori inflasi itu adalah :

#### 1. Teori kuantitas

Teori kuantitas dikemukakan oleh kaum moneteris, yang memandang inflasi sebagai gejala moneter murni, yang berpangkal dari penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansioner (pembelanjaan defisit, kebijakan kredit yang ekspansioner). Pengendalian inflasi menuntut adanya kondisi yang penting dan cukup berupa pengendalian jumlah uang beredar agar pertumbuhannya sesuai dengan pertumbuhan dan permintaan akan uang sehingga harga-harga stabil. Hal ini dapat dilakukan melalui pengekangan permintaan melalui kebijakan moneter dan fiskal, pengendalian kenaikan upah dan penstabilan kurs pada tingkat yang wajar (Gammell, 1992:254)

#### 2. Teori Keynes

Teori ini didasarkan atas teori makronya, dan menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini tidak lain adalah proses perebutan bagian keuntungan diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat



akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan *inflationary gap*) (Boediono, 2001:170)

### 3. Teori Strukturalis

Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), sehingga teori ini sering disebut sebagai teori "inflasi dalam jangka panjang" (Boediono, 2001:174). Analisis strukturalis dikaitkan dengan identifikasi dan analisis terhadap hambatan yang diperkirakan. Hambatan yang paling pokok pada umumnya adalah (1) penawaran bahan pangan yang tidak elastis ; (2) kendala devisa; dan (3) kendala anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (Gammell, 1992:252). Hambatan penawaran bahan pokok yang tidak elastis akibat dari urbanisasi dan pendapatan yang tinggi akan mengakibatkan permintaan akan bahan pangan yang meningkat dengan cepat sehingga tidak dapat dipenuhi oleh sektor pertanian.

Sisi penawaran sangat rendah karena adanya kendala struktural dalam sektor itu, penawaran yang tidak elastis itu merupakan faktor penyebab inflasi. Hambatan devisa timbul karena nilai pertumbuhan devisa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan akan barang impor yang meningkat. Berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan yang makin cepat, pertambahan penduduk dan upaya industrialisasi yang pesat yang berlangsung dalam lingkungan dengan teknologi yang masih terbatas, ketidakseimbangan struktural dan mobilitas faktor produksi yang tidak sempurna. Kekurangan barang impor dan meningkatnya harga barang impor mengakibatkan ketidakseimbangan neraca pembayaran pada akhirnya memaksa negara untuk mendevaluasi mata uangnya sehingga akan menambah tekanan pada inflasi. Hambatan yang diidentifikasi oleh kaum strukturalis adalah tidak mencukupinya sumber daya finansial dalam

negeri. Usaha-usaha pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian (dalam penyediaan fasilitas sosial dan fisik), diatasi dengan anggaran defisit yang berpotensi menimbulkan inflasi.

Secara definitif yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus terus menerus selama suatu periode tertentu. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

Pada umumnya inflasi disebabkan oleh, *Pertama* terjadi karena adanya kenaikan permintaan agregatif dimana kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh (*full employment*) Kenaikan permintaan agregatif tersebut selain dapat menaikkan harga juga dapat meningkatkan produksi, kondisi biasa disebut dengan *demand pull inflation*. *Kedua*, inflasi terjadi karena tingkat penawaran lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat permintaan, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga factor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu.. Kondisi ini dinamakan dengan *cost push inflation*

Sementara itu, kenaikan harga pada periode tertentu dapat diukur dengan menggunakan index harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain :

1. Indeks biaya hidup (*consumer price index*)
2. Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*)
3. GNP deflator

Indeks biaya hidup mengukur biaya/pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Banyaknya barang dan jasa yang tercakup dapat bermacam-macam. Di Indonesia dikenal indeks 9 bahan pokok, 62 macam barang serta 162 macam barang. Karena arti penting masing-masing barang dan jasa tersebut bagi seseorang itu tidak sama, maka dalam perhitungan angka indeksnya diberi angka penimbang tertentu.

Angka penimbang biasanya didasarkan atas besarnya persentase pengeluaran untuk barang tertentu terhadap pengeluaran keseluruhan. Besarnya persentase ini dapat berubah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu direvisi apabila ternyata terdapat perubahan. Misalnya dengan adanya listrik masuk desa, maka persentase pengeluaran untuk minyak tanah terhadap pengeluaran total menjadi makin kecil. Dengan perubahan angka penimbang ini maka indeks harganyapun akan berubah. Laju inflasi dapat dihitung dengan cara menghitung persentase kenaikan/penurunan indeks harga ini dari tahun ke tahun (atau dari bulan ke bulan). Misalnya, indeks biaya hidup tahun 2004 sebesar 181,5 (atas dasar tahun dasar 2000), kemudian naik menjadi 195,3 pada tahun 2005 maka :

$$\text{Laju inflasi antara 2004 dan 2005} = \frac{195,3 - 181,5}{181,5} = 7,6\%$$

Indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan indeks harga ini sejalan/searah dengan indeks biaya hidup.

GNP deflator adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan dua indeks di atas, dalam cakupan barangnya. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila dibanding dengan dua indeks di atas. GNP deflator diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan).

$$\text{GNP deflator} = \frac{\text{GNP Nominal}}{\text{GNP Riil}} \times 100$$

#### 2.1.4 Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi; dapatlah inflasi dibagi ke dalam tiga kategori, yakni: merayap (*creeping inflation*), inflasi menengah (*galloping inflation*) serta inflasi tinggi (*hyper inflation*). Serbenarnya pembagian ke dalam tiga kategori ini tidak ada patokan/standar yang pasti. Biasanya *creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari

10 % per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

Inflasi menengah (*galloping inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*) dan kadang-kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).

Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang.

### 2.1.5 Efek Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan: *equity effect*, sedang efek terhadap alokasi faktor produksi, dan produk nasional masing-masing disebut dengan *efficiency* dan *output effects*.

#### a. Efek Terhadap Pendapatan (*Equity Effect*)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Misalnya seorang yang memperoleh pendapatan tetap Rp. 500.000 per tahun sedang laju inflasi sebesar 10%, akan menderita kerugian penurunan pendapatan riil sebesar inflasi tersebut, yakni Rp. 50.000,00. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Contoh lain, yang dirugikan karena adanya inflasi adalah orang/pihak

yang memberikan pinjaman uang dengan bunga lebih rendah dari laju inflasi. Misalnya, dia memberi pinjaman Rp 10.000,00 dengan bunga 10% per tahun. Apabila laju inflasi sebesar 15% per tahun, maka sebenarnya nilai riil pinjamannya akan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan presentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan presentase lebih besar dari laju inflasi. Adanya serikat buruh yang kuat kadangkala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan presentase yang lebih besar daripada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Inflasi seolah-olah merupakan pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi orang lain.

b. Efek Terhadap Efisiensi (*Efficiency Effects*)

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya akan merubah pola alokasi faktor produksi yang sudah ada. Memang tidak ada jaminan bahwa alokasi faktor produksi lebih efisien dalam keadaan tidak ada inflasi. Namun, kebanyakan ahli berpendapat bahwa inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien.

c. Efek Terhadap Output (*Output Effects*)

Dalam menganalisa kedua efek di atas (*equity* dan *efficiency effects*) digunakan suatu anggapan bahwa output tetap. Hal ini dilakukan agar supaya dapat diketahui efek inflasi terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi dari jumlah output tertentu tersebut. Ibaratnya, "kue pembangunan" sudah tertentu

besarnya, pertanyaannya bagaimana efek inflasi terhadap pembagian kue tersebut (equity effects) serta terhadap efisiensi penggunaan/alokasi faktor produksi untuk menghasilkan kue tersebut. Lain halnya dengan output effect, yang mempertanyakan bagaimana efek inflasi terhadap besarnya kue. Artinya, apakah inflasi akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan output. Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi itu cukup tinggi (hyper inflation) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dengan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output. Intensitas efek inflasi ini berbeda-beda, tergantung apakah inflasi dibarengi dengan kenaikan produksi dan *employment* atau tidak. Apabila produksi barang ikut naik, maka kenaikan produksi ini sedikit banyak dapat mengerem laju inflasi. Tetapi apabila ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (*full-employment*) intensitas efek inflasi makin besar. Inflasi dalam keadaan kesempatan kerja penuh ini sering disebut dengan inflasi murni (*pure inflation*).

### 2.1.6 Cara Mencegah Inflasi

Dengan menggunakan persamaan Irving Fisher  $MV = PT$ , dapat dijelaskan bahwa inflasi timbul karena  $MV$  naik lebih cepat daripada  $T$ . Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya inflasi maka salah satu variabel ( $M$  atau  $V$ ) harus dikendalikan. Disamping ini, volume  $T$  ditingkatkan guna mencegah/mengurangi inflasi. Cara mengatur variabel  $M$ ,  $V$  dan  $T$  tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan moneter, fiskal atau kebijaksanaan yang menyangkut kenaikan produksi.

#### a. Kebijakan Moneter

Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar (M). Salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral (*demand deposit*). Uang giral dapat terjadi melalui dua cara, pertama apabila seseorang memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro. Kedua, apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima kas tetapi dalam bentuk giro. Deposito yang timbul dengan cara kedua sifatnya lebih inflatoir daripada cara pertama. Sebab cara pertama hanyalah pengalihan bentuk saja dari uang kas ke uang giral. Bank sentral dapat mengatur uang giral ini melalui penetapan cadangan minimum. Untuk menekan laju inflasi cadangan minimum dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Disamping cara ini, bank sentral dapat menggunakan apa yang disebut dengan tingkat diskonto (*discount rate*). Discount rate adalah tingkat diskonto untuk pinjaman yang diberikan oleh bank sentral pada bank umum. Pinjaman ini biasanya berujud tambahnya cadangan bank umum yang ada pada bank sentral. Discount rate ini bagi bank umum merupakan biaya untuk pinjaman yang diberikan oleh bank sentral. Apabila tingkat diskonto dinaikkan (oleh bank sentral) maka gairah bank umum untuk meminjam makin kecil sehingga cadangan yang ada pada bank sentral juga mengecil. Akibatnya, kemampuan bank umum memberikan pinjaman pada masyarakat makin kecil sehingga jumlah uang beredar turun dan inflasi dapat dicegah. Instrumen lain yang dapat dipakai untuk mencegah inflasi adalah politik pasar terbuka (jual/beli surat berharga). Dengan cara menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga laju inflasi dapat lebih rendah.

#### b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi secara total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan

pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan tetap sehingga inflasi dapat ditakan.

c. Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Output

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang didalam negeri cenderung menurunkan harga.

d. Kebijaksanaan Penentuan Harga dan Indexing

Ini dilakukan dengan menentukan ceiling harga, serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah (dengan demikian gaji / upah secara riil tetap). Kalau indeks harga naik, maka gaji/upah akan dinaikkan.

### 2.1.7 Keterkaitan Antara Inflasi dan Pengangguran

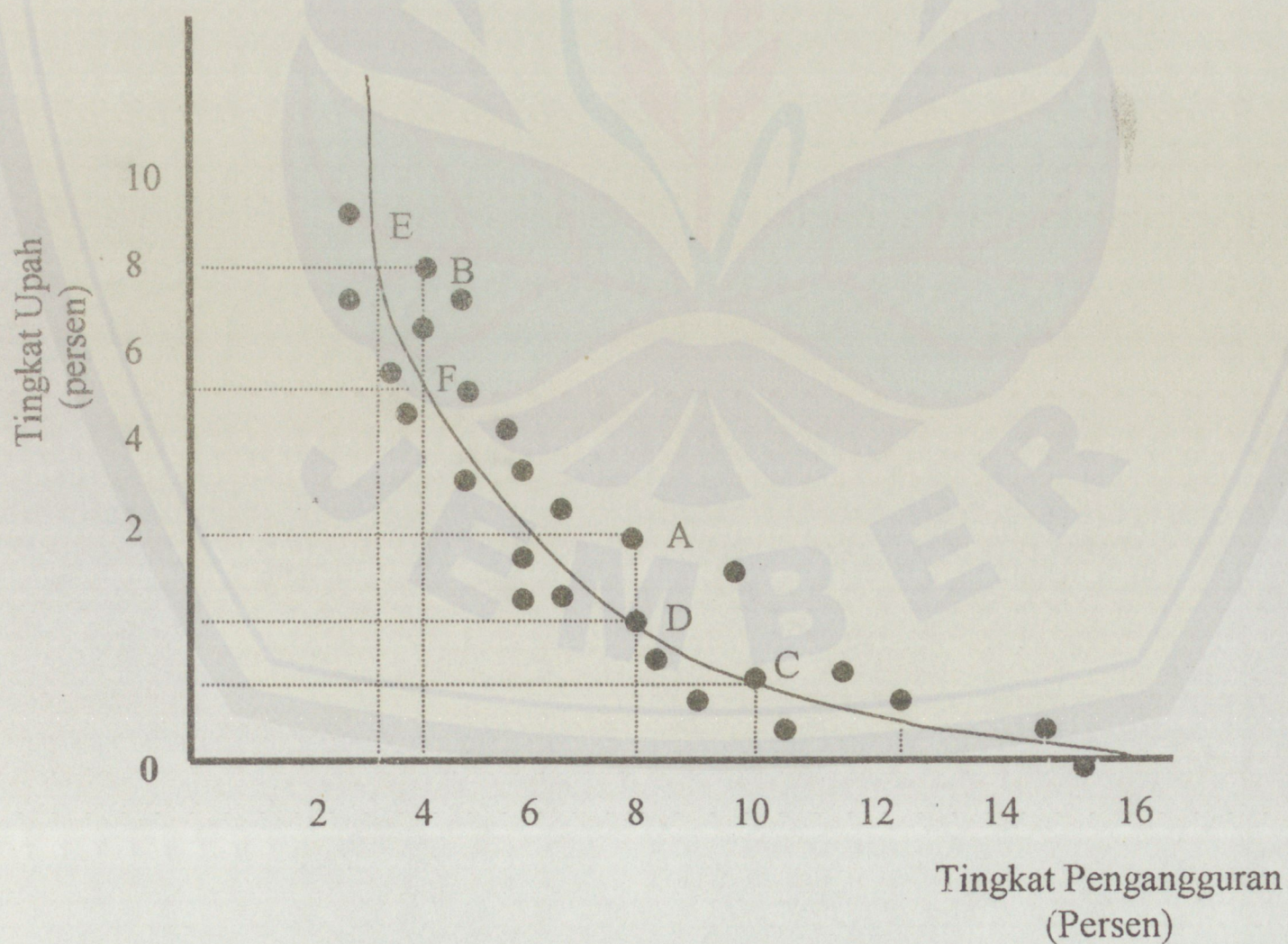
Bisa dipahami bahwa setiap negara bercita-cita untuk mewujudkan tahap kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Dalam prakteknya mencapai tujuan ini sangat sukar. Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menyadari bahwa apabila tingkat pengangguran rendah, masalah inflasi akan dihadapi, makin rendah tingkat pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi. Sebaliknya apabila terdapat masalah pengangguran yang serius, tingkat harga-harga adalah relatif stabil. Berarti tidak mudah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan kestabilan harga secara serentak.

Kurva yang menggambarkan hubungan diantara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dinamakan kurva Phillips, yaitu berdasarkan kepada nama ahli ekonomi yang pertama kali menganalisis mengenai sifat dari perhubungan tersebut. Dalam tahun 1950-an Profesor A.W. Phillips, seorang ahli ekonomi Inggris, melakukan studi mengenai kebijakan stabilisasi perekonomian, dan salah satu aspek yang dipelajarinya adalah mengenai perkaitan di antara tingkat inflasi upah (tingkat kenaikan upah) dan tingkat pengangguran.



Untuk menentukan ciri-ciri hubungan diantara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran Profesor Phillips mengumpulkan data mengenai kedua-dua hal tersebut di Inggris di antara tahun 1861 dan 1957. Data yang diperoleh kemudian digambarkan dalam suatu grafik seperti yang terdapat dalam Gambar 2.2 setiap titik dalam grafik tersebut menggambarkan tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran yang berlaku di suatu tahun tertentu. Titik A misalnya menggambarkan bahwa pada suatu tahun tertentu upah mengalami kenaikan sebanyak 4 persen dan tingkat pengangguran adalah 8 persen; sedangkan titik B menunjukkan pada tahun lainnya tingkat upah naik sebanyak 9 persen dan tingkat pengangguran mencapai hanya 4 persen. Berdasarkan data yang dikumpulkan secara statistik Profesor Phillips menganalisis sifat hubungan antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran.

Gambar 2.2 : Kurva Phillips, hubungan tingkat upah dengan tingkat pengangguran



Sumber : Sadono Sukirno, 2002

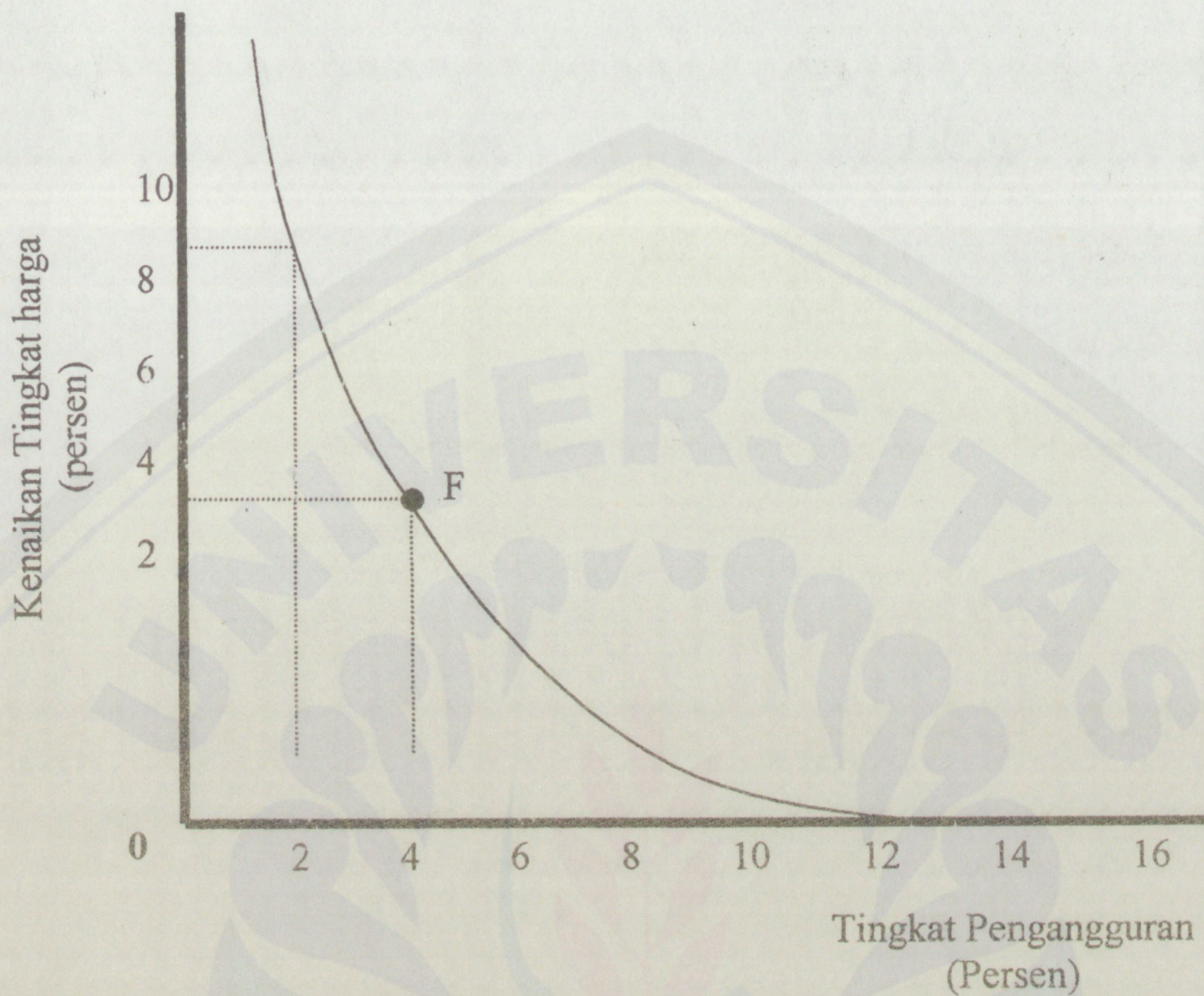
Dalam gambar grafik 2.2 menunjukkan bahwa sifat umum dari kurva phillips adalah pada mulanya penurunannya adalah sangat curam, tetapi semakin lama ia semakin bertambah landai. Kurva yang terbentuk demikian menggambarkan sifat perkaitan sebagai berikut :

1. Apabila tingkat pengangguran sangat rendah, tingkat upah semakin cepat kenaikannya. Perhatikan titik E dan F. Titik E menggambarkan pengangguran adalah 3 persen dan kenaikan upah 9 persen. Sedangkan titik F menggambarkan tingkat pengangguran adalah 4 persen dan tingkat kenaikan upah mencapai 6,5 persen
2. Apabila tingkat pengangguran relatif tinggi, kenaikan upah relatif lambat berlakunya. Keadaan ini ditunjukkan dengan jelas oleh pergerakan dari titik C ke titik D. Pengurangan tingkat pengangguran dari 10 ke 8 persen hanya menaikkan upah sebanyak hampir satu setengah persen.

Kurva Phillips juga digunakan untuk menggambarkan hubungan di antara tingkat kenaikan harga dengan tingkat pengangguran. Untuk tujuan ini grafik yang dibuat haruslah menggambarkan keadaan kedua-dua variabel tersebut. Dengan demikian grafik yang digambarkan tidak lagi seperti yang terdapat dalam gambar 2.2 tetapi haruslah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.3 dapat dilihat dari gambar 2.3 bahwa sumbu datar tetap menunjukkan tingkat pengangguran, maka kurva Phillips yang terdapat dalam gambar 2.3 menunjukkan sifat hubungan di antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam suatu perekonomian.

Bentuk kurva phillips yang terdapat dalam gambar 2.3 tidak berbeda dengan yang terdapat dalam gambar 2.2 ini berarti sifat perkaitan di antara inflasi harga dan tingkat pengangguran tidak berbeda dengan sifat hubungan di antara inflasi upah dan tingkat pengangguran seperti yang telah digambarkan. Pada waktu pengangguran tinggi, kenaikan harga-harga relatif lambat akan tetapi makin rendah pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi yang berlaku.

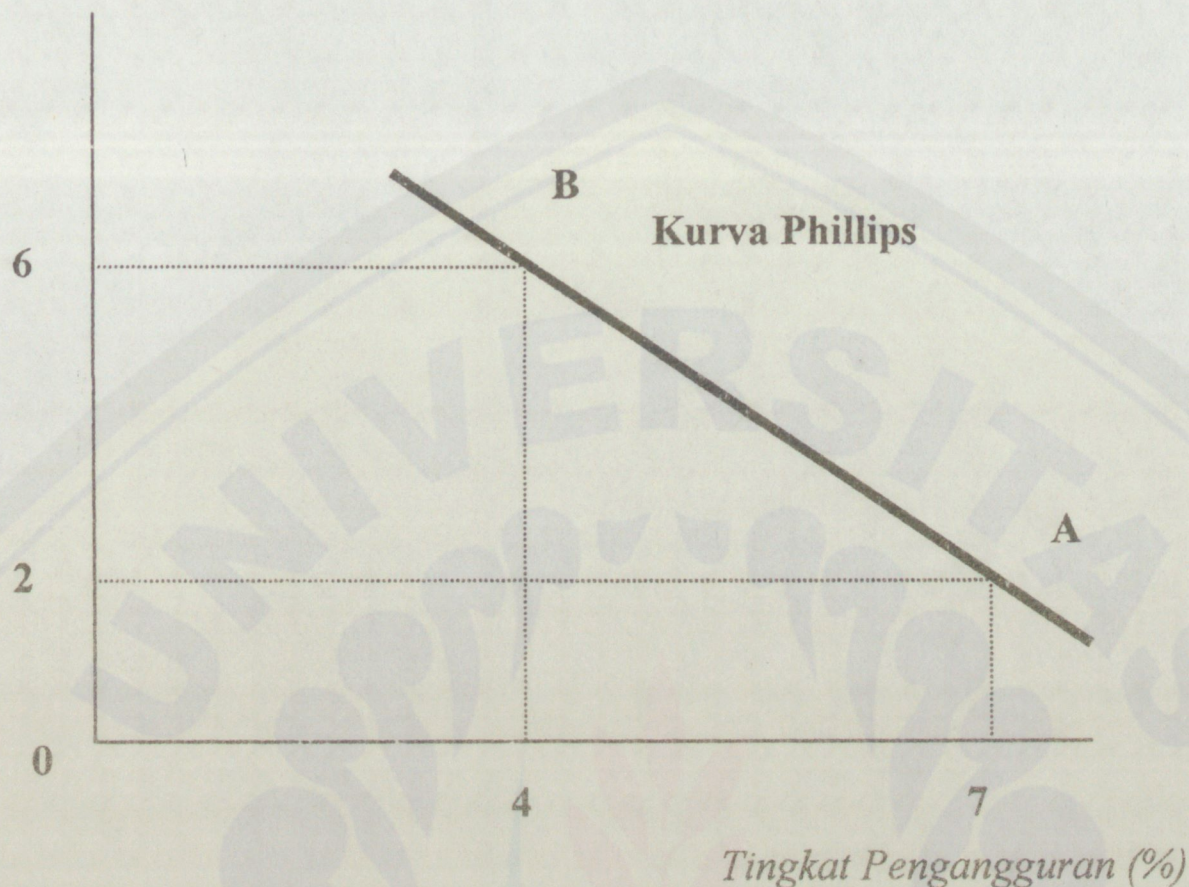
Gambar 2.3 : Kurva Phillips, hubungan tingkat harga dengan tingkat pengangguran



Sumber: Sadono Sukirno : 2002

Disamping menyadari ciri-ciri dasar yang bersamaan ini, perlu pula disadari perbedaan di antara kurva Phillips dalam gambar 2.2 dan 2.3, yaitu apabila kedua-duanya digambarkan dalam satu grafik, kurva dalam keadaan ini adalah : pada suatu tingkat pengangguran tertentu inflasi upah adalah lebih cepat dari inflasi harga. Sebagai contoh, dalam gambar 2.2 ditunjukkan tingkat kenaikan upah kira-kira 6,5 persen pada ketika pengangguran adalah 8 persen. Sedangkan gambar 2.3 menunjukkan inflasi harga hanya melebihi 4 persen pada ketika tingkat pengangguran adalah 4 persen. Perbedaan ini disebabkan karena adanya kenaikan produktivitas yang bersamaan berlakunya dengan kenaikan upah. Sebagai akibat kenaikan produktivitas tersebut biaya produksi tidak meningkat secepat kenaikan upah, dan menyebabkan kenaikan harga lebih rendah dari kenaikan upah. Atau lebih sederhana lagi Kurva Philips bisa digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4 : Kurva Phillips, hubungan laju inflasi dan tingkat pengangguran

*Laju inflasi (%/th)*

Sumber : Gregory Mankiw, 2000

## 2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nurul Athiyah ( 2000 ) dengan judul “ Analisis Hubungan Kausalitas Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1983 – 1997 menunjukkan bahwa pengujian hubungan kausalitas tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran dengan uji kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah ( timbal balik ) antara tingkat inflasi dan terhadap pengangguran di Indonesia. Pada uji kausalitas Granger terjadi kesimetrisan waktu pengaruh antara inflasi terhadap pengangguran dan pengangguran terhadap inflasi. Pengaruh pengangguran terhadap inflasi lebih nyata (lebih signifikan dan lebih pasti) daripada pengaruh inflasi terhadap pengangguran.

Sementara itu untuk penelitian lain dari Siti Mukhannatus Saidah dengan judul “ Analisis Pengaruh Kurs Valuta Asing, Tingkat Bunga Deposito dan Kebijakan Uang Ketat Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia Tahun 1998.I –

2002 IV” mengatakan bahwa berdasarkan hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang ECM (*Error Correction Model*) untuk variabel nilai tukar rupiah, berpengaruh negatif dan signifikan dimana setiap ada kenaikan nilai tukar 1 satuan maka akan diikuti dengan penurunan inflasi sebesar 13,599 satuan, sedangkan pada tingkat bunga deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi dimana setiap ada kenaikan tingkat bunga deposito sebesar 1 satuan, maka akan diikuti dengan kenaikan inflasi sebesar 2,297 satuan. Dan untuk variabel kebijakan uang ketat tidak berpengaruh secara signifikan yang ditunjukkan dengan nilai t hitung yang lebih besar dari  $\alpha$  sebesar 0,05 % padatingkat signifikansi 95%.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan tinjauan pustaka diduga bahwa antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran memiliki pola hubungan yang negatif.

Bab 3. METODE PENELITIAN



### 3.1 Rancangan Penelitian

#### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode eksplanatif (*explanatory research*) yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih.

#### 3.1.2 Unit analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah mengenai pola hubungan antara tingkat Inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia pada periode tahun 1983 – 2005.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Untuk jenis dan kriteria yang menjadi obyek penelitian tersebut adalah tingkat inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen dan tingkat pengangguran terbuka dengan menggunakan populasi dan tidak menggunakan sampel.

### 3.3 Tehnik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data runtut waktu (*time series*) secara tahunan mengenai tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Data tersebut diperoleh dari laporan BI, Badan Pusat Statistik dan data literature lain dari studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dalam periode data tahunan mulai dari tahun 1983 hingga 2005.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum barang dan jasa secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Perhitungan inflasi didasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen dengan metode komulatif :

$$\text{Inflasi}_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

- 2 Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mendapatkan pekerjaan menurut referensi waktu tertentu. Yang termasuk pengangguran terbuka meliputi mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta juga mereka yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan, dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Besarnya tingkat pengangguran dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

### 3.5 Metode Analisis Data

Dalam realitas ekonomi, model regresi linier dimana variabel terikat diregresikan atas variabel-variabel bebas tidak dapat dipastikan mengandung pengertian bahwa variabel terikat secara kausal betul-betul ditentukan oleh variabel-variabel bebas secara sepihak. Ada kemungkinan dalam suatu model persamaan tunggal, variabel terikat ditentukan oleh variabel bebas dan sebaliknya variabel bebas juga ditentukan oleh variabel terikat sehingga hal ini terdapat kausalitas dua arah (*bidirectional causality*). Bentuk metode pengujian kausalitas yang telah dikembangkan adalah Granger. Dan untuk estimasi dengan regresi secara keseluruhan teknis digunakan *Eviews Software* (Arief, 1993:152).

#### 3.5.1 Uji Kausalitas Granger

Konsep kausalitas Granger dikenal sebagai konsep kausalitas sejati atau konsep prediktabilitas (*predictability concept*), dimana masa lalu dapat mempengaruhi masa kini atau masa datang, akan tetapi masa kini atau masa datang tidak dapat mempengaruhi masa lalu (Dumairy, 1987:4). Formulasi dari kausalitas Granger adalah sebagai berikut :

$$X_t = \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n b_j Y_{t-j} + f + U_t$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^r c_i Y_{t-i} + \sum_{f=1}^s d_f X_{t-f} + V_t$$

Keterangan :

$X_t$	= Besarnya inflasi yang diukur dengan Indek Harga Konsumen pada kurun waktu ke-n
$Y_t$	= Besarnya jumlah pengangguran pada kurun waktu ke-n
$m, n, r, s$	= <i>Time lag</i>
$a_i$	= Koefisien regresi dari X pada $X = f(Y)$
$b_j$	= Koefisien regresi dari Y pada $X = f(Y)$
$c_i$	= Koefisien regresi dari Y pada $Y = f(X)$
$d_j$	= Koefisien regresi dari X pada $X = f(X)$
$U_t, V_t$	= Error terms diasumsikan tidak mengandung korelasi serial

Yang perlu diperhatikan dalam formulasi diatas adalah adanya *time lag* dalam suatu model regresi tersebut. Dimana diasumsikan bahwa perubahan pada suatu variabel bebas akan mengakibatkan perubahan variabel terikat setelah suatu selang waktu tertentu.

Hasil-hasil kedua bentuk model regresi linier ini menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien regresi, yaitu :

1. Jika  $\sum_{f=1}^n b_j \neq 0$  dan  $\sum_{f=1}^s d_j = 0$ , maka terdapat kausalitas searah dari Y ke X.
2. Jika  $\sum_{f=1}^n b_j = 0$  dan  $\sum_{f=1}^s d_j \neq 0$ , maka terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y.
3. Jika  $\sum_{f=1}^n b_j = 0$  dan  $\sum_{f=1}^s d_j = 0$ , maka X dan Y bebas antara satu dengan yang lain.
4. Jika  $\sum_{f=1}^n b_j \neq 0$  dan  $\sum_{f=1}^s d_j \neq 0$ , maka terdapat kausalitas dua arah antara Y dan X.



### 3.5.2 Pengujian Koefisien Regresi Linier

#### A) Uji Signifikansi Garis Regresi Secara Keseluruhan (F Test)

Metode uji F digunakan untuk menguji pengaruh variable-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variable terikat, dengan rumus sebagai berikut (Supranto; 1991 : 108)

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Rumusan Hipotesis :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$$

Kriteria Pengambilan keputusan dengan derajat keyakinan 95 %, maka :

- a. Jika Fprobabilitas lebih kecil daripada derajat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 5 % maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya secara bersama-sama variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat;
- b. Jika Fprobabilitas lebih besar daripada derajat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 5 % maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya secara bersama-sama variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

#### B) Uji Signifikansi Parameter

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variable bebas (*independent*) terhadap variable terikat (*dependent*) digunakan uji statistik dengan rumus sebagai berikut

$$t - \text{hitung} = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Rumusan hipotesis :

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_a : \beta \neq 0$$

Pengambilan keputusan dengan derajat keyakinan 95%, maka :

- a. Jika  $F_{\text{probabilitas}}$  lebih kecil dengan menggunakan derajat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 5% ( $\alpha=0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variable bebas  $X$  mempunyai pengaruh signifikan terhadap variable terikat ;
- b. Jika  $F_{\text{probabilitas}}$  lebih besar dengan menggunakan derajat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 5 % ( $\alpha=0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variable bebas  $X$  tidak mempunyai pengaruh terhadap variable terikat  $Y$

### C) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini juga dikenal dengan uji kecocokan model dengan menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Semakin tinggi  $R^2$  maka semakin tepat model tersebut menerangkan variasi variable terikat. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  dirumuskan dengan (Supranto;1991:110)

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS} = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2}$$

Bernilai  $0 < R^2 < 1$

keterangan : ESS = Jumlah kuadrat dari regresi

TSS = Total jumlah kuadrat

RSS = Jumlah kuadrat residual



## Bab 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 4.1.1 Perkembangan Inflasi IHK di Indonesia Pada Tahun 1983 – 2005

Sejak kurun waktu tahun 70-an sampai 80-an perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut sangat didukung oleh sektor luar negeri yaitu melonjaknya harga minyak di pasar dunia. Kenaikan ekspor akibat dari naiknya harga minyak merupakan dasar yang kuat bagi pertumbuhan pendapatan nasional sebesar 6,3% pada tahun 1979 kemudian meningkat 9,9% pada tahun 1984. Walaupun pada tahun 1978 pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter 15 Nopember 1978 (KNOP I5) berupa devaluasi mata uang Rupiah terhadap \$US, yang mengakibatkan terjadinya lonjakan inflasi hingga 5,7% dan semakin meningkat pada tahun 1979 21,8%. Dalam analisis Sebastian Edwards (1990), dikatakan bahwa efektifitas devaluasi 1978 itu hanya berlaku sampai 8 bulan. Selibuhnya, keadaan akan berada pada posisi keseimbangan semula; dan tentunya pada tingkat harga yang lebih tinggi (Prasentiantono, 1995:117). KNOP I5 dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor dan menurunkan impor yang kemudian berpengaruh terhadap kenaikan harga barang dan jasa.

Memasuki tahun 1982, perekonomian Indonesia mengalami guncangan akibat dari penurunan harga minyak bumi, depresiasi perekonomian dunia, meningkatnya tindakan-tindakan proteksi negara-negara maju dan melemahnya daya saing barang-barang produksi dalam negeri terhadap barang impor dan barang ekspor di pasaran internasional, walaupun tingkat Inflasi dalam negeri tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB yaitu dari 7,93%\* pada tahun 1981 menjadi 2,24% tahun 1982. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah mengambil Kebijakan Devaluasi pada Maret 1983 dan Deregulasi di bidang perbankan pada 1 Juni 1983. Tahun 1983 merupakan tahun awal dari berbagai kebijakan moneter yang diambil pemerintah yang mempunyai cukup banyak perubahan. Dimana dengan dikeluarkannya Deregulasi Perbankan tersebut laju Inflasi Indonesia

Trilyun, dengan PMD (Penanaman Modal Dalam Negeri) sejumlah Rp. 50 trilyun dan PMA (Penanaman Modal Asing) \$US 24 milyar. (Prasentiantono, 1996:135). Ini terbukti dengan relatif tingginya laju inflasi mendekati 2 digit yaitu 9,8% (1993), 9,24% (1994) dan 8,6% (1995).

Tahun 1997 merupakan awal dari keterpurukan perekonomian Indonesia yaitu dengan membumbungnya laju Inflasi di atas dua digit yaitu 11,1% kondisi ini merupakan dampak dari krisis moneter yang melanda Asia sejak pertengahan tahun 1997. Usaha untuk menekan laju Inflasi tidak mengalami keberhasilan, hal ini disebabkan oleh faktor konfigurasi ekonomi makro yaitu volume uang beredar tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB. Dalam arti rasio PDB terhadap  $M_2$  menurun. Sehingga berdampak Inflasi melalui mekanisme pasar uang.

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, seiring dengan kenaikan harga-harga tersebut nilai uang turun pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.

Dalam perkembangannya di Indonesia selama periode penelitian bisa dikatakan mengalami trend yang menurun. Pada awal tahun penelitian 1998 inflasi mencapai angka tertinggi yaitu hingga mencapai 63%, hal ini masih disebabkan oleh dampak dari terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia. Krisis yang melanda Indonesia telah memporak-porandakan fundamen perekonomian sehingga butuh waktu yang tidak singkat untuk kembali pulih pada kondisi perekonomian seperti sebelum terjadinya krisis.

Tahun berikutnya seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai pulih inflasi mengalami penurunan tajam sehingga pada tahun ini inflasi ada pada level 18,28 %, dan ini merupakan penurunan inflasi terbesar selama periode penelitian. Tahun berikutnya inflasi terus mengalami trend yang positif yaitu kembali turun bahkan hingga mencapai level 1 digit yaitu 5,54%. Melihat perkembangan inflasi yang terus mengalami penurunan diperkirakan pada tahun 2001 akan lebih baik, hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik yaitu mencapai 4,5% - 5,5% dan stabilnya nilai tukar rupiah.

Berdasarkan asumsi indikator-indikator ekonomi tersebut inflasi diperkirakan sebesar 4,0%-6,0% diluar kebijakan harga dan pendapatan. Sementara itu, dampak kebijakan pemerintah dibidang harga dan pendapatan diperkirakan 2,0%-2,5%.

Namun, dalam perkembangannya pertumbuhan ekonomi dan pergerakan nilai tukar tidak sesuai dengan yang diasumsikan semula dan inflasi mengalami beberapa tekanan. Meningkatnya tekanan inflasi tahun 2001 lebih disebabkan oleh kuatnya pengaruh kebijakan pemerintah dibidang harga dan pendapatan seperti kenaikan gaji dan upah pegawai, serta naiknya tarif dasar listrik dan BBM. Pengaruh kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan terhadap inflasi IHK terdiri dari dampak langsung, dampak tidak langsung, dan *announcement effect* dari kebijakan pemerintah tersebut. Dampak langsung dihitung dengan mengeluarkan sumbangan inflasi dari komoditas yang mengalami kenaikan harga dari hasil perhitungan dalam keranjang IHK. Dampak tidak langsung dihitung dengan mengeluarkan sebagian sumbangan inflasi dari komoditas sub kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan komoditas yang mengalami kenaikan harga. Perhitungan dampak tidak langsung tersebut menggunakan pola dampak kenaikan TDL dan BBM terhadap industri-industri penghasil komoditas terkait. Sementara itu, *announcement effect* dari kebijakan pemerintah terhadap inflasi diperkirakan dengan mengalikan persentase kenaikan gaji dan UMR terhadap tingkat sensitivitas kenaikan gaji dan UMR terhadap IHK. Secara kumulatif bulanan, dampak langsung kebijakan harga memberikan dampak sebesar 1,51% yang terutama didorong oleh kenaikan harga BBM dan Gas Elpiji sebesar 0,59% dan cukai rokok sebesar 0,43%. Sementara itu, kenaikan tarif angkutan dan tarif dasar listrik memberikan dampak langsung masing-masing sebesar 0,26% dan 0,23%. Pengaruh dampak tidak langsung yang adalah sebesar 0,84% yang terkait dengan kenaikan tarif angkutan dan TDL serta kenaikan BBM. Sementara itu, *announcement effect* kebijakan pemerintah memberikan dampak sebesar 0,83% yang terutama terjadi pada saat pengumuman pertama kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri serta UMR. (Ninasapati. 2004 : 61)

Menyikapi persoalan tersebut Bank Indonesia melakukan upaya-upaya guna untuk mencapai sasaran inflasi dengan menggunakan beberapa instrumen

moneternya, namun berbagai instrumen moneter belum mampu secara maksimal mengurangi tekanan terhadap inflasi mengingat sumber-sumber tekanan inflasi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh otoritas moneter.

Perkembangan selanjutnya seiring dengan efektifnya pengendalian moneter dan ditunjang pertumbuhan ekonomi yang membaik berangsur-angsur inflasi mengalami penurunan periode ini terus berlanjut hingga akhir periode penelitian dimana inflasi berada pada level 6,25% pada tahun 2003 dan 6,15% pada tahun 2004. Turunnya laju inflasi ini selain disebabkan menguatnya pertumbuhan ekonomi juga disebabkan melemahnya ekonomi dunia yang menyebabkan menguatnya nilai tukar rupiah.

Menginjak pada tahun berikutnya, dimana inflasi mengalami lonjakan yang begitu tajam, meski pada bulan Desember terjadi deflasi, secara keseluruhan laju inflasi pada tahun 2005 mencapai 17,1 persen. Pelonjakan angka inflasi ini lebih banyak disebabkan oleh kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dua kali selama tahun 2005, yang memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa sampai berulang-ulang kali. Angka inflasi 17,1 persen yang di luar perkiraan banyak kalangan ini jauh di atas angka inflasi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2005, yaitu sebesar 8% - 9%.

Dilihat dari kelompok pengeluaran penyebab inflasi tahun 2005, inflasi pada kelompok transportasi dan komunikasi adalah yang terbesar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya dengan angka mencapai 44,75 persen. Kelompok ini mencatat inflasi yang sangat tinggi pada bulan Maret dan Oktober 2005 bersamaan dengan kenaikan harga BBM dalam negeri, yaitu berturut-turut 10,03 persen dan 28,57 persen. Sementara itu kelompok pengeluaran yang paling rendah tingkat inflasinya selama tahun 2005 adalah kelompok kesehatan, hal yang sama dengan yang terjadi pada tahun 2004. Hanya saja pada tahun 2005 laju inflasi kelompok ini mencapai 6,13 persen, sedangkan di tahun 2004 mencapai 4,75 persen. (Imam Sugema dan Solikin, 2004 : 137)

Sektor kesehatan memang menjadi sektor yang lebih mampu dikontrol pemerintah ketimbang sektor-sektor lainnya, termasuk sektor pendidikan. Meskipun komoditas obat-obatan juga terkena dampak kenaikan harga BBM,

namun pemerintah mampu melakukan intervensi melalui subsidi dan kontrol ketat sejumlah BUMN produsen obat, suatu hal yang sulit dilakukan terhadap sektor pendidikan yang lebih *volatile* (rawan) terhadap penyesuaian-penyesuaian biaya. Sedangkan sektor transportasi jelas merupakan sektor yang paling terkena dampak kebijakan kenaikan harga BBM. Di bulan terjadi kenaikan harga BBM, sektor transportasi akan langsung melakukan penyesuaian. Berikut data tingkat inflasi di Indonesia dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2005.

Dalam lima tahun terakhir selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, realisasi inflasi IHK juga ditentukan oleh komponen inflasi lain yang terkait yaitu inflasi inti, inflasi *volatile food*, inflasi *administered prices*. Realisasi inflasi IHK 2005 jauh lebih tinggi bila dibandingkan pada 2004 yang terutama disebabkan oleh perkembangan faktor – faktor non fundamental. Terkendalnya laju inflasi 2004 yang tercatat 6,4% tidak terlepas dari terkendalnya kenaikan *administered prices* dan harga *volatile food*.

Pada tahun 2004 inflasi *administered prices* tercatat hanya sebesar 5,4% dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar 1,1%. Kondisi ini sejalan dengan tidak adanya kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga kelompok barang yang bersifat strategis seperti BBM dan TDL. Disamping itu produksi beras pada tahun 2004 yang relatif lebih baik diikuti dengan melimpahnya pasokan dan relatif terjaganya arus distribusi barang – barang sehingga memberikan kontribusi pada terkendalnya inflasi kelompok *volatile food* yang mencatat sebesar 6,5% dengan sumbangan inflasi sebesar 1,3%.

Adanya fluktuasi inflasi IHK dari tahun ke tahun juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga dan tarif sejumlah barang dan jasa seperti BBM, listrik, air minum serta menaikkan upah minimum tenaga kerja swasta dan gaji pegawai negeri. Berikut dalam tabel 4.1 akan dapat diketahui untuk masing – masing komponen dalam pembentukan inflasi IHK yang terdiri dari inflasi inti yang merupakan faktor - faktor penyebab fundamental serta inflasi *volatile food* dan inflasi *administered* yang merupakan faktor - faktor penyebab non fundamental dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Tabel 4.1  
Sumbangan Komponen Inflasi IHK (dalam persentase)

Disagresi Inflasi	Inflasi Inti		Inflasi Volatile Food		Inflasi Administered		Inflasi IHK
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	
2001	10,0	6,2	12,4	2,9	23,5	3,4	12,6
2002	7,0	4,2	9,7	2,3	22,1	3,5	10,0
2003	6,9	4,1	-2,4	-0,6	9,1	1,6	5,1
2004	6,7	4,0	6,5	1,3	5,4	1,1	6,4
2005	9,8	6,1	15,5	2,8	41,7	8,1	17,1

Sumber : Laporan Perekonomian BI tahun 2001 - 2005

Maka dari uraian dan gambaran umum mengenai tingkat inflasi IHK yang terjadi di Indonesia mulai tahun 1983 sampai dengan tahun 2005 dapat digambarkan kondisi yang fluktuatif (kenaikan secara tajam dari tahun sebelumnya) terutama pada tahun 1983, 1993, 1998 dan yang terakhir pada tahun



2005. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 yang dikenal sebagai krisis moneter dimana terjadi kenaikan harga yang begitu tajam sampai menembus level 77% pada periode tersebut. Sementara tingkat inflasi terendah yang mencapai titik 1,92% terjadi pada tahun 1999 terjadi deflasi selama 8 bulan berturut – turut, deflasi tersebut disebabkan oleh penurunan harga kelompok bahan makanan secara terus menerus dalam periode tersebut. Dari gambaran tingkat inflasi dari tahun ke tahun mulai tahun 1983 hingga 2005 akan diterangkan Inflasi IHK berikut ini.

No	TAHUN	TINGKAT INFLASI (%)
1	1983	11,97
2	1984	9,06
3	1985	4,38
4	1986	9,15
5	1987	9,25
6	1988	5,59
7	1989	6,11
8	1990	9,93
9	1991	9,93
10	1992	5,05
11	1993	10,14
12	1994	9,68
13	1995	8,95
14	1996	5,12
15	1997	10,31
16	1998	77,63
17	1999	1,92
18	2000	12,33
19	2001	12,55
20	2002	10,03
21	2003	5,06
22	2004	6,40
23	2005	17,11

Sumber : BPS laporan tahunan dalam angka tahun 1983 – 2005

#### 4.1.2 Perkembangan Pengangguran di Indonesia Pada Tahun 1983 – 2005

Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan Indonesia. Keadaan ini terutama disebabkan adanya ketimpangan antara perkembangan angkatan kerja yang jauh lebih pesat dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Para penganggur ini adalah mereka yang tidak bekerja tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (Sigit, 1988 : 22).

Pengangguran di Indonesia, dalam perkembangannya dari tahun-ketahun selama periode 1983-1997, terlihat mengalami yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan oleh penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat dan daya serap tenaga kerja secara nasional. Untuk jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan jumlah pengangguran terendah terjadi pada tahun 1983. Bisa diterangkan sebagai berikut

No	Tahun	Jumlah Pengangguran
1	1983	1.207.616
2	1984	1.228.971
3	1985	1.368.477
4	1986	1.854.725
5	1987	1.714.452
6	1988	2.090.341
7	1989	2.130.600
8	1990	2.122.300
9	1991	2.163.700
10	1992	2.185.600
11	1993	2.245.500
12	1994	3.737.500
13	1995	6.251.200
14	1996	4.407.800
15	1997	4.275.200
16	1998	5.060.000
17	1999	6.030.000
18	2000	5.680.000
19	2001	8.000.000
20	2002	9.130.000
21	2003	10.300.000
22	2004	10.830.000
23	2005	11.190.000

Sumber : BPS, laporan tahunan dalam angka tahun 1983 - 2005

Sementara itu juga dapat digambarkan pada angkatan kerja di Indonesia pada tahun 1983 berjumlah 60.975.565 jiwa dengan jumlah tenaga kerja yang menganggur sebesar 1.207.616 jiwa. Penyebab utama besarnya angka pengangguran terbuka ini adalah mutu angkatan kerja yang relatif masih rendah dilihat dari tingkat pendidikannya.

Pada periode 1984-1987, angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 10.248.815 jiwa. Pada tahun 1984 angkatan kerja di Indonesia berjumlah 62.384.316 jiwa dan pada tahun 1987 berjumlah 72.633.131 jiwa. Sementara pada periode tersebut jumlah pengangguran terbuka tercatat sebesar 1.228.971 jiwa pada tahun 1984 dan 1.742.952 jiwa pada tahun 1987. pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang cukup besar ini belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh lapangan kerja yang tersedia, artinya terjadi ketimpangan antara permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Ketimpangan ini merupakan salah satu penyebab tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Pada periode 1988-1996, angka angkatan kerja dan pengangguran masih menunjukkan peningkatan. Tahun 1988 jumlah angkatan kerja di Indonesia 74.922.636 jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 2.090.341 jiwa, sedangkan pada tahun 1996 jumlah angkatan kerja Indonesia sudah mencapai 90.109.600 jiwa dengan jumlah pengangguran sebesar 4.407.800 jiwa. Hal ini disebabkan karena keterampilan para pencari kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Sementara itu dalam hal pengupahan ditujukan agar upah terendah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum dan mengurangi kesenjangan antara upah tertinggi dan upah terendah.

Krisis nilai tukar rupiah yang diikuti pula dengan krisis hutang dan perbankan yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian Indonesia pada tahun laporan 1997. semester I tahun 1997, perekonomian Indonesia sempat memperlihatkan perkembangan yang baik, secara keseluruhan perekonomian Indonesia tahun 1997 mencatat pertumbuhan ekonomi yang jauh melambat disertai dengan meningkatnya laju inflasi dan tingkat pengangguran. Pada tahun ini jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 87.049.800 jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 4.275.200

jiwa. Pertumbuhan ekonomi tahun 1997 tercatat hanya sebesar 4,7 persen jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8,0 persen. Dilihat dari sisi permintaan, melemahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun ini terutama diakibatkan oleh melemahnya permintaan domestik dan berbagai kendala yang timbul dalam proses produksi sebagai dampak dari krisis moneter yang terjadi, sehingga hal ini memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi kondisi kesempatan kerja dan pada akhirnya mendorong berkurangnya permintaan terhadap tenaga kerja (Laporan tahunan BI, 1998).

#### 4.2 Hasil Analisis Data

Pada bagian ini akan disajikan hasil dari analisis data empiris. Dengan menggunakan uji kausalitas granger dengan alat bantu *Eviews Software* menunjukkan pengaruh antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi atas dasar Indeks Harga Konsumen (IHK) yang masing-masing pada lag 4 dan dengan derajat keyakinan 5 % sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Dengan menggunakan alat uji kausalitas Granger dengan menggunakan alat bantu *Eviews Software* sehingga dari hasil analisis tersebut diperoleh suatu analisis mengenai nilai dari koefisien regresi yang ditunjukkan dengan nilai  $F_{\text{probabilitas}}$  sebesar  $0,031360 < \alpha$  memberikan arti bahwa tingkat pengangguran mempunyai pengaruh kuat terhadap tingkat inflasi, sedangkan nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0,741625 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mempunyai pengaruh sebesar 74,1% terhadap tingkat inflasi sedangkan faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini mempunyai pengaruh sebesar 25,9%

Sementara hasil regresi Uji Granger untuk Inflasi Terhadap Pengangguran diperoleh suatu analisis diperoleh suatu analisis mengenai nilai dari koefisien regresi yang ditunjukkan dengan nilai  $F_{\text{probabilitas}}$  sebesar  $0,000082 < \alpha$  memberikan arti bahwa tingkat inflasi mempunyai pengaruh kuat terhadap tingkat pengangguran sedangkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,959915 menunjukkan bahwa tingkat inflasi mempunyai pengaruh sebesar 95,9 % terhadap tingkat pengangguran, sedangkan faktor-faktor lain di luar dari penelitian ini mempunyai pengaruh sebesar 4,1%

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara dua variabel merupakan analisis runtun waktu (*time series*) jangka pendek. Dalam analisis ekonometrika, penelitian mengenai kausalitas antara variabel-variabel ekonomi bagaikan dua sisi keping mata uang, sehingga kontribusi Granger (1969) tentang definisi kausalitas dalam konteks analisis runtun waktu merupakan sumbangan besar, terutama bagi teoritis dan praktisi ekonometrika. Konsep kausalitas Granger dikenal juga sebagai konsep kausalitas sejati atau konsep prediktabilitas (*predictability concept*) di mana masa lalu dapat mempengaruhi masa kini atau masa datang, akan tetapi masa kini atau masa yang akan datang tidak dapat mempengaruhi masa lalu (Dumairy, 1987:4).

Kurva Phillips yang menggambarkan keterkaitan antara inflasi dan tingkat pengangguran semakin tinggi tingkat pengangguran, akan semakin rendah laju inflasi. Kurva Phillips tersebut merupakan keterkaitan empiris yang menghubungkan perilaku tingkat upah dan inflasi harga dengan tingkat pengangguran. Kurva ini menyimpulkan bahwa penurunan tingkat pengangguran akan selalu dapat dipertahankan dengan mendorong kenaikan laju inflasi, dan bahwa laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran.

Dari hasil analisis data tersebut maka dapat dijelaskan bahwa antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran memiliki pola hubungan yang negatif. Selain itu juga terdapat pengaruh diantara kedua variabel tersebut. Dalam uji kausalitas granger menunjukkan bahwa inflasi secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran sebesar 95,9%. Sementara itu tingkat pengangguran kurang begitu signifikan dalam mempengaruhi tingkat inflasi yaitu sebesar 74,1%.

Dalam teori lain, menurut pandangan Keynes yang merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya kalau terjadi pengangguran pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya sehingga sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau

harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi, sehingga inflasi yang tak terkendali tidak sampai terjadi. Dalam situasi di mana terjadi gerak gelombang naik turunnya kegiatan ekonomi, pemerintah dapat menjalankan kebijaksanaan pengelolaan pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif. Dari berbagai kebijaksanaan yang bisa di ambil, Keynes lebih sering mengandalkan kebijaksanaan fiskal. Dengan kebijaksanaan fiskal pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Terutama dalam situasi di mana sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh, kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran.

Sementara itu teori monetaris berpandangan lain yang pada prinsipnya kelompok monetaris berpandangan bahwa perkembangan moneter merupakan unsur yang penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga-harga; bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter; dan bahwa perilaku otoritas moneter menentukan pertumbuhan jumlah uang beredar dalam gelombang konjunktur. Penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang. Sebagaimana dijelaskan Friedman bahwa perubahan jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat inflasi dalam jangka panjang dan perilaku GNP riil dalam jangka panjang. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar- akselerasi dan deselerasi - sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi riil. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi. Dari hasil studi historisnya ia menyimpulkan bahwa secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan terjadinya *booms* dan inflasi, sedang penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan juga deflasi.

Berikut juga dengan pandangan strukturalis, dikatakan jika inflasi dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dari perekonomian dengan hambatan - hambatan yang terjadi antara lain penawaran bahan pangan, kendala devisa, dan

Bab 5. SIMPULAN DAN SARAN



### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian pola hubungan kausalitas tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran dengan uji kausalitas granger menunjukkan adanya pola hubungan kausalitas dua arah (timbang balik) antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia pada periode tahun 1983 – 2005.

Dan berdasarkan hasil analisis data dari uji kausalitas granger dapat diperjelas lagi bahwa tingkat inflasi lebih kuat dan signifikan untuk mempengaruhi tingkat pengangguran daripada tingkat inflasi untuk mempengaruhi tingkat pengangguran.

### 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil analisis hubungan kausalitas tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 1983 – 2005, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi pada tingkat yang wajar haruslah diikuti dengan pengendalian tingkat pengangguran yang wajar pula;
2. Upaya perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja di semua sektor dan pemanfaatan tenaga kerja yang yang berdaya guna dan berhasil guna harus diperhatikan dan diprioritaskan. Pertumbuhan penduduk akan membawa konsekuensi meningkatnya jumlah angkatan kerja yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan yang harus diwaspadai.
3. Kebijakan penanggulangan inflasi di Indonesia selain didasarkan atas adanya *monetary causation* perlu diperhatikan juga faktor-faktor lain seperti proses formasi harga dalam pasar yang tidak sempurna dan kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif tetapi menimbulkan biaya produksi.

4. Secara implementatif, untuk tingkat inflasi mempengaruhi tingkat pengangguran disarankan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan menggunakan hasil analisis data dari uji kausalitas Granger pada Lag 2. Sementara secara teori dengan uji yang sama memang lebih ideal untuk tingkat inflasi mempengaruhi tingkat pengangguran menggunakan pada Lag 4. Dan untuk tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat inflasi baik secara ideal maupun implementatif disarankan untuk menggunakan pada Lag 4.

Carmel, Norman (Ed). 1992. *Ekonomi Pembangunan: Deskripsi, Survey, Terjemahan Nirwono*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Giarso, T. 1991. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Kanisius: Yogyakarta.

Gujarati, Damodar. 1995. *Basic Econometrics*. Mc Graw Hill Inc.



- Gunawan, Anton Hermanto. 1991 *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia
- Insunkindro. 1993. *Ekonomi dan Bank Teori dan Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta : BPFE
- Iswardono. 1991. *Uang dan Bank* Yogyakarta: BPFE
- Juono, Umar 1983. *Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi, Bukan Kawan Seiring*, Prisma,, Desember, Jakarta: LP3ES
- Mangkusuwondo, Suhadadi 1987. *Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro*, Jakarta : Gramedia.
- Mankiw, Gregory N, *Pengantar Ekonomi jilid 2*. terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, 2000
- Mishkin, Frederic S (1986). *The Economic Of Money , Banking , and Financial Market* First Edition, Columbia University.
- Moeis, Jossy P. 1992 *Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik di Indonesia: Penerapan Search Theory*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol XL No 2 Hal 108-133
- Mulyani, Sri 1992. *Teori Moneter*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nasution, Anwar. 2005, *Seri Pemikiran Ekonomi dalam Setengah Abad Terakhir*, Jakarta. Kanisius
- Nopirin. 1992. *Ekonomi Moneter Buku dua*, Yogyakarta: BPFE
- Ninasapati, 2004. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 07 nomor 2* September 2004, Bank Indonesia
- Pangestu, Marie. 1992. *Perkembangan dan Prospek Moneter*, Jurnal Analisis CSIS, Tahun XXI No 3.
- Prasetiantono, A Tony. 1995, *Agenda Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Simanjuntak, Payaman J. 1985 *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: LPFE – UI
- Sinungan, Muchdarsyah. 1995. *Uang dan Bank*. Jakarta : Rineka Cipta

- Sugema, Imam dan Solikin. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Vol 7 Nomor 2. September 2004. Bank Indonesia
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi jilid 2*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2002
- Susanti, Hera dkk. 1995. *Indikator-Indikator Makroekonomi*, Jakarta: LPFE – UI
- Sigit, Hananto dkk 1988, *Model Ekonomi Demografi Proyeksi Ekonomi dan Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Formal dan Informal Menjelang Lepas Landas 1985 – 1995*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sundrum. RM, 1980, *Supply Uang dan Harga-harga di Indonesia tahun 1961 – 1970*, Untaian Ekonomi Moneter dan Perbankan, BPFE UGM : Yogyakarta
- \_\_\_\_\_ 1980, *Jumlah Uang yang Beredar: Suatu Intrepretasi Kembali*, Untaian Ekonomi Moneter dan Perbankan, BPFE UGM : Yogyakarta
- Swasono dan Endang Sulistyaningsih. 1987. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja*, Yogyakarta : BPFE
- Taufiq, Muhammad. 1997. *1997 Inflasi dan Dampak Terhadap Kegiatan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, No.5, Th 4, Hal 43-51
- Uphadi, AD 1997. *Ancaman Inflasi Saat Krisis Rupiah*, dalam Media Indonesia, Th.XXVIII, 2 September.
- Wijaya, Faried dan Susatwo Hadiwigeno. 1992. *Untaian Bacaan Terpilih Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Yogyakarta: BPFE
- Widodo, Suseno Triyanto, 1991, *Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius: Yogyakarta

## Lampiran 1

## DATA BASE

TINGKAT INFLASI DAN PENGANGGURAN INDONESIA  
TAHUN 1983-2005

TAHUN	INF (%)	UN (jiwa)
1983	11,97	1.207.616
1984	9,06	1.228.971
1985	4,38	1.368.477
1986	9,15	1.854.725
1987	9,25	1.714.452
1988	5,59	2.090.341
1989	6,11	2.130.600
1990	9,93	2.122.300
1991	9,93	2.163.700
1992	5,05	2.185.600
1993	10,14	2.245.500
1994	9,68	3.737.500
1995	8,95	6.251.200
1996	5,12	4.407.800
1997	10,31	4.275.200
1998	77,63	5.060.000
1999	1,92	6.030.000
2000	12,33	5.860.000
2001	12,55	8.000.000
2002	10,03	9.130.000
2003	5,06	10.300.000
2004	6,40	10.830.000
2005	17,11	11.190.000

Sumber : BPS, data tahunan dalam angka tahun 1983 – 2005

## Lampiran 2

**LAG 1 INF Terhadap UN**

Dependent Variable: INF

Method: Least Squares

Date: 06/02/06 Time: 23:41

Sample(adjusted): 1984 2005

Included observations: 22 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1180.433	636.4897	1.854599	0.0792
INF(-1)	-0.120430	0.228421	-0.527228	0.6041
UN(-1)	2.78E-05	0.000113	0.244995	0.8091

R-squared	0.016941	Mean dependent var	1162.182
Adjusted R-squared	-0.086539	S.D. dependent var	1511.711
S.E. of regression	1575.765	Akaike info criterion	17.68899
Sum squared resid	47177655	Schwarz criterion	17.83777
Log likelihood	-191.5789	F-statistic	0.163711
Durbin-Watson stat	2.023433	Prob(F-statistic)	0.850172

**LAG 1 UN Terhadap INF**

Dependent Variable: UN

Method: Least Squares

Date: 06/02/06 Time: 23:45

Sample(adjusted): 1984 2005

Included observations: 22 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	150395.1	371860.2	0.404440	0.6904
UN(-1)	1.040605	0.066222	15.71399	0.0000
INF(-1)	113.7124	133.4520	0.852085	0.4048

R-squared	0.929179	Mean dependent var	4735289.
Adjusted R-squared	0.921724	S.D. dependent var	3290531.
S.E. of regression	920618.6	Akaike info criterion	30.42960
Sum squared resid	1.61E+13	Schwarz criterion	30.57838
Log likelihood	-331.7256	F-statistic	124.6411
Durbin-Watson stat	2.156433	Prob(F-statistic)	0.000000

## LAG 2 UN Terhadap INF

Dependent Variable: INF

Method: Least Squares

Date: 06/02/06 Time: 23:43

Sample(adjusted): 1985 2005

Included observations: 21 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1159.972	756.6114	1.533115	0.1448
INF(-1)	-0.104079	0.246141	-0.422845	0.6780
INF(-2)	-0.051503	0.250411	-0.205672	0.8396
UN(-1)	-0.000315	0.000422	-0.744734	0.4672
UN(-2)	0.000399	0.000466	0.857135	0.4040
R-squared	0.066150	Mean dependent var		1174.381
Adjusted R-squared	-0.167313	S.D. dependent var		1547.932
S.E. of regression	1672.421	Akaike info criterion		17.88619
Sum squared resid	44751883	Schwarz criterion		18.13488
Log likelihood	-182.8050	F-statistic		0.283341
Durbin-Watson stat	2.317504	Prob(F-statistic)		0.884467

## LAG 2 INF Terhadap UN

Dependent Variable: UN

Method: Least Squares

Date: 06/02/06 Time: 23:50

Sample(adjusted): 1985 2005

Included observations: 21 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	261213.0	442795.7	0.589918	0.5635
UN(-1)	0.954189	0.247196	3.860053	0.0014
UN(-2)	0.102632	0.272684	0.376378	0.7116
INF(-1)	108.5462	144.0502	0.753531	0.4621
INF(-2)	-98.71571	146.5496	-0.673599	0.5102
R-squared	0.928543	Mean dependent var		4902257.
Adjusted R-squared	0.910679	S.D. dependent var		3274903.
S.E. of regression	978759.9	Akaike info criterion		30.63022
Sum squared resid	1.53E+13	Schwarz criterion		30.87891
Log likelihood	-316.6173	F-statistic		51.97763
Durbin-Watson stat	1.933239	Prob(F-statistic)		0.000000

## LAG 3 UN Terhadap INF

Dependent Variable: INF

Method: Least Squares

Date: 06/02/06 Time: 23:43

Sample(adjusted): 1986 2005

Included observations: 20 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	963.2165	572.2730	1.683141	0.1162
INF(-1)	-0.259849	0.173203	-1.500259	0.1574
INF(-2)	0.013772	0.174525	0.078910	0.9383
INF(-3)	0.001596	0.178658	0.008931	0.9930
UN(-1)	-0.000489	0.000299	-1.634756	0.1261
UN(-2)	-0.000681	0.000414	-1.644807	0.1240
UN(-3)	0.001525	0.000340	4.492257	0.0006
R-squared	0.635104	Mean dependent var		1211.200
Adjusted R-squared	0.466690	S.D. dependent var		1578.682
S.E. of regression	1152.882	Akaike info criterion		17.20713
Sum squared resid	17278770	Schwarz criterion		17.55564
Log likelihood	-165.0713	F-statistic		3.771091
Durbin-Watson stat	1.429881	Prob(F-statistic)		0.021332



**LAG 3 INF Terhadap UN**

Dependent Variable: UN

Method: Least Squares

Date: 06/02/06 Time: 23:51

Sample(adjusted): 1986 2005

Included observations: 20 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8965.655	474467.9	0.018896	0.9852
UN(-1)	0.983424	0.248257	3.961319	0.0016
UN(-2)	-0.270622	0.343291	-0.788315	0.4447
UN(-3)	0.377850	0.281480	1.342368	0.2024
INF(-1)	80.34797	143.6015	0.559521	0.5853
INF(-2)	-58.04952	144.6978	-0.401178	0.6948
INF(-3)	221.3879	148.1245	1.494607	0.1589
R-squared	0.941022	Mean dependent var		5078946.
Adjusted R-squared	0.913802	S.D. dependent var		3255666.
S.E. of regression	955846.8	Akaike info criterion		30.64780
Sum squared resid	1.19E+13	Schwarz criterion		30.99631
Log likelihood	-299.4780	F-statistic		34.57047
Durbin-Watson stat	2.230097	Prob(F-statistic)		0.000000

## LAG 4 UN Terhadap INF

Dependent Variable: INF

Method: Least Squares

Date: 06/02/06 Time: 23:45

Sample(adjusted): 1987 2005

Included observations: 19 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	916.2519	610.6146	1.500540	0.1644
INF(-1)	0.106740	0.284990	0.374539	0.7158
INF(-2)	0.110553	0.184536	0.599088	0.5624
INF(-3)	-0.000718	0.172526	-0.004164	0.9968
INF(-4)	-0.252302	0.187978	-1.342190	0.2092
UN(-1)	-0.000128	0.000339	-0.377887	0.7134
UN(-2)	-0.000880	0.000430	-2.049359	0.0676
UN(-3)	0.002152	0.000457	4.705518	0.0008
UN(-4)	-0.001016	0.000601	-1.690327	0.1218
R-squared	0.741625	Mean dependent var	1226.789	
Adjusted R-squared	0.534925	S.D. dependent var	1620.360	
S.E. of regression	1105.027	Akaike info criterion	17.15864	
Sum squared resid	12210848	Schwarz criterion	17.60601	
Log likelihood	-154.0071	F-statistic	3.587930	
Durbin-Watson stat	2.166393	Prob(F-statistic)	0.031360	

**LAG 4 INF Terhadap UN**

Dependent Variable: UN

Method: Least Squares

Date: 06/02/06 Time: 23:52

Sample(adjusted): 1987 2003

Included observations: 17 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	651579.9	492421.1	1.323217	0.2223
UN(-1)	2.300587	0.567716	4.052358	0.0037
UN(-2)	-0.975109	0.407608	-2.392270	0.0437
UN(-3)	0.543956	0.364640	1.491760	0.1741
UN(-4)	-1.040192	0.682847	-1.523316	0.1662
INF(-1)	430.5088	267.1802	1.611305	0.1458
INF(2)	-818.0289	260.8156	-3.136426	0.0139
INF(-3)	202.7006	123.7776	1.637619	0.1401
INF(-4)	-289.7276	194.4489	-1.489994	0.1746
R-squared	0.959915	Mean dependent var		4570835.
Adjusted R-squared	0.919831	S.D. dependent var		2694713.
S.E. of regression	762985.6	Akaike info criterion		30.23292
Sum squared resid	4.66E+12	Schwarz criterion		30.67403
Log likelihood	-247.9798	F-statistic		23.94722
Durbin-Watson stat	1.457903	Prob(F-statistic)		0.000082

